

TESIS

**PERUBAHAN FUNGSI RUANG KAWASAN PINGGIRAN
KOTA BULUKUMBA**

Diajukan oleh

**ASMIRAWATI
MPW4513015**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN
KOTA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

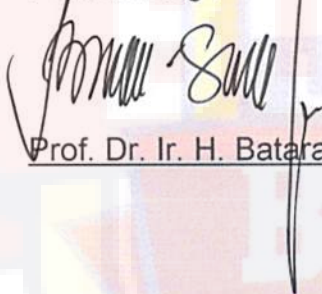
2018

TESIS

1. Judul : Perubahan Fungsi Ruang Kawasan Pinggiran Kota Bulukumba
2. Nama Mahasiswa : ASMIRAWATI
3. NIM : MPW 45 13 015
4. Program Studi : Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

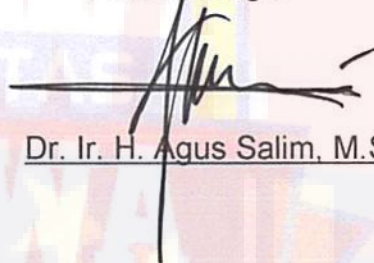
Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si.

Pembimbing II



Dr. Ir. H. Agus Salim, M.Si.

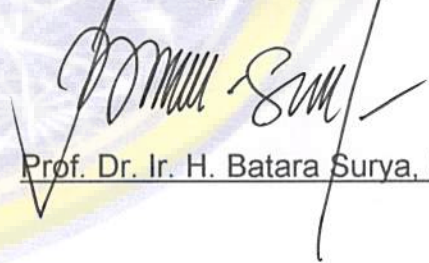
Mengetahui:

Direktur
Program Pascasarjana



Dr. Muhlis Rustan, SE, M.Si.

Ketua Program Studi PWK



Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/tanggal : 28 Desember 2017

Tesis atas nama : ASMIRAWATI

NIM : MPW 45 13 015

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si.
(Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. Ir. H. Agus Salim, M.Si.
(Pembimbing II)

Anggota Penguji : 1. Dr. M. Iqbal S Suhaeb, SE, M.T

: 2. Dr.Ir.H.Syahriar Tato, SH.,MH.,M.Si.

Makassar, 2017
Direktur,



Dr. Muhlis Rustan, SE, M.Si

NIDN. 09 31 08 65 01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah karya saya sendiri tidak pernah diajukan untuk memperoleh/ mendapatkan gelar kesarjanaan pada suatu Perguruan Tinggi. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan, selain secara tertulis diakui dalam karya ilmiah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata mengandung unsur duplikasi (plagiat) dari Tesis orang lain/ Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Perencanaan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Makassar, Desember 2017



ABSTRAK

Asmirawati, 2018. *Perubahan Fungsi Ruang Kawasan Pinggiran Kota Bulukumba*. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. Dibimbing Oleh: (1) Batara Surya dan (2) Agus Salim

Dinamika Perkembangan Kota Bulukumba kearah wilayah pinggiran menyebabkan proses ekspansi wilayah perkotaan merekondisi terjadinya alih fungsi guna lahan pada kawasan peri urban yang dicirikan dengan perkembangan dari fungsi agraris kearah industrial perkotaan. Proses ini berkontribusi positif terhadap pengurangan lahan pertanian berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap sebuah fenomena serta difokuskan untuk meneliti perubahan fungsi ruang sebagai determinan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dengan menggunakan teknik pengambilan data melalui observasi, survey, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah Super Impose untuk melihat perubahan pemanfaatan ruang kawasan pinggiran Kota Bulukumba dan analisis statistik deskriptif menggunakan data responden hasil kuesioner yang ditabulasikan menggunakan distribusi frekuensi dan persentase yang kemudian dilakukan penilaian interval kelas skor tertinggi dan minimum terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akibat perubahan fungsi ruang di wilayah pinggiran Kota Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana fungsi ruang bekerja sebagai determinan perubahan kondisi sosial masyarakat serta menganalisis dampak yang timbul dari perubahan fungsi ruang terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan fungsi ruang yang terbangun di kawasan pinggiran Kota Bulukumba dari ciri agraris berkembang kearah industrial perkotaan dan permukiman formal berkontribusi positif terhadap terbentuknya formasi sosial baru, serta perubahan sistem ekonomi pada masyarakat lokal ditandai dengan penurunan jenis usaha dibidang pertanian serta penurunan hasil produktifitas pertanian di wilayah pinggiran Kota Bulukumba. Artinya perubahan ekonomi dan sosial masyarakat lokal disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan dari lahan agraris kearah industrial perkotaan.

Kata Kunci: *Kawasan Pinggiran; Fungsi Ruang; Kondisi Sosial; dan Kondisi Ekonomi Masyarakat.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi kelancaran serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **”Perubahan Fungsi Ruang Kawasan Pinggiran Kota Bulukumba”**. Tesis ini merupakan persyaratan akademik dalam menyelesaikan Program Pascasarjana Megister Perencanaan Wilayah Dan Kota, Universitas Bosowa Makassar. Tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Pemerintahan Kabupaten Bulukumba**, yang senantiasa memberikan bantuan data untuk penyempurnaan Tesis ini.
2. Bapak **Dr. Muhlis Ruslan, SE, M.Si**, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si**, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Bosowa Makassar sekaligus selaku Pembimbing I dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak **Dr. Ir. Agus Salim, M.Si**, selaku pembimbing II yang penuh dengan kearifan, ketulusan dan kesabaran dalam meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dari awal sampai akhir selesainya tesis ini.
5. Bapak **Dr. M. Iqbal S Suhaeb, SE, M.T** dan Bapak **Dr. Ir. Sahriar Tato, M.S., MM.**, selaku penguji yang selalu memberikan masukan dan petunjuk mulai dari ujian Proposal sampai pada ujian Tutup.
6. Seluruh **Dosen pengajar** dan **Staf** pada Program Studi Pascasarjana Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Bosowa Makassar.
7. Kedua orang tua Bapak **Sultan** dan Ibu **Kamsina** yang mendukung baik materi maupun moral dalam proses penyelesaian studi ini selalu memberikan semangat dan bantuan yang tidak ada henti-hentinya.

8. Suami tercinta **Ahmad, ST** serta kedua anak **Muzayyin** dan **Abid** yang selalu menemani, mendukung sekaligus menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
9. Teman-teman Program Pascasarjana Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Bosowa Makassar Angkatan 2013 yang telah membantu dalam menyelesaikan studi.
10. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, demi penyempurnaan tulisan ini penulis berharap masukan, saran maupun kritik demi kesempurnaan penulis berikutnya.

Makassar, Desember 2017

BOSOWA
PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Lingkup Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	8
1. Pengertian kota.....	8
2. Konsep Pengembangan Kota	10
3. Teori Perubahan Pemanfaatan Lahan.....	18
4. Konsep Wilayah Peri Urban (WPU)	22
5. Teori Tentang Perubahan Sosial	24

6. Hakikat Perubahan Sosial	28
7. Tinjauan Dampak Perubahan Transpormasi Spasial di Wilayah Peri Urban	36
8. Perkembangan Perkotaan dalam Aspek Ekonomi Masyarakat....	43
B. Penelitian Terdahulu	46
C. Kerangka Pikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Desain Penelitian.....	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	53
C. Populasi dan sampel.....	55
D. Jenis dan Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Variabel Penelitian	58
G. Analisis Data	59
H. Definisi Operasional.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba.....	63
B. Gambaran Umum Kecamatan Gantarang	80
C. Karakteristik Lokasi Penelitian	86
1. Karakteristik Fisik.....	86
2. Perkembangan Fungsi-Fungsi Perkotaan di Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali	88

3. Aksesibilitas	88
4. Kondisi Sosial Masyarakat Kawasan Peri Urban Kota Bulukumba	89
5. Karakteristik Responden	91
D. Perubahan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pinggiran Kota Bulukumba	95
E. Fungsi Ruang Bekerja Sebagai Determinan Perubahan Kondisi Sosial Masyarakat	100
1. Deskripsi Responden.....	100
2. Sintesis Penelitian	109
F. Perubahan Fungsi Ruang Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Setempat.....	111
1. Deskripsi Responden.....	111
2. Sintesis Penelitian	115
G. Determinan Perubahan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Peri Urban Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat.....	117
1. Perbedaan Formasi Sosial Masyarakat WPU Kota Bulukumba	117
2. Perbedaan Struktur Sosial Masyarakat WPU Kota Bulukumba ..	119
H. Dampak Perubahan Fungsi Ruang Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat	121
1. Perubahan Orientasi Mata Pencapaian Setempat.....	121
2. Pengurangan Luasan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Permukiman	

dan Industrial Perkotaan..... 122

3. Perbedaan Tingkat Kesejahteraan Antar Penduduk Lokal

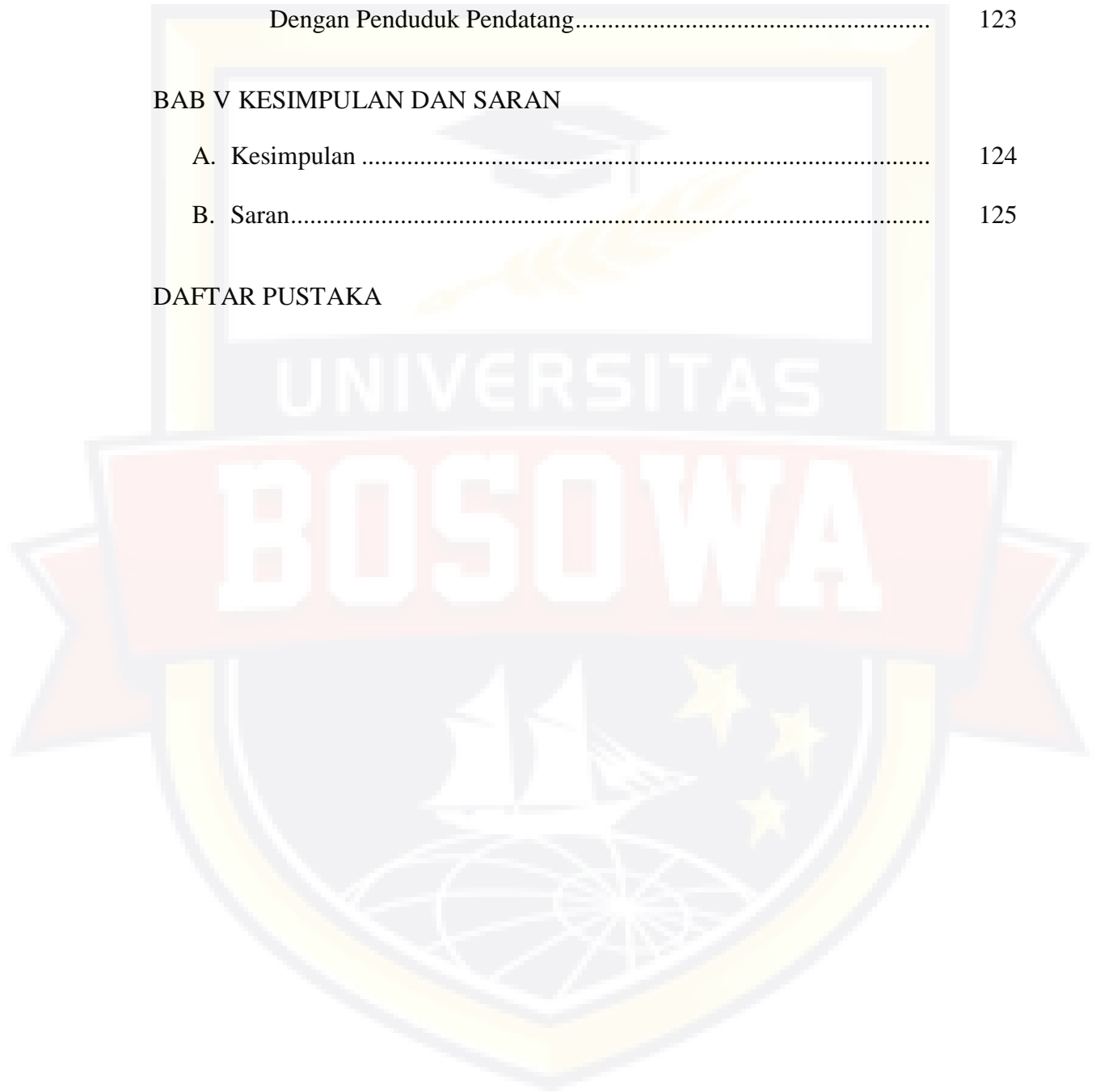
Dengan Penduduk Pendatang..... 123

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 124

B. Saran..... 125

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kebutuhan Data Penelitian.....	57
Tabel 3.2 Variabel Penelitian.....	59
Tabel 3.3 Penentuan Bobot Dengan Skala Likert	60
Tabel 4.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Bulukumba	64
Tabel 4.2 Rincian Tata Guna Lahan di Kabupaten Bulukumba	67
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Bulukumba 2010-2015.....	77
Tabel 4.4 Rata-rata Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba per km ² Tahun 2015.....	78
Tabel 4.5 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015 ...	79
Tabel 4.6 Luas wilayah, status dan klasifikasi menurut desa/kelurahan di Kecamatan Gantarang.....	81
Tabel 4.7 Luas Lahan Pertanian Dan Non Pertanian Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Gantarang	82
Tabel 4.8. Jumlah Kepala Keluarga, penduduk, luas dan kepadatan menurut desa/kelurahan di Kecamatan Gantarang tahun 2014	83
Tabel 4.9. Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Gantarang Tahun 2014.....	85
Tabel 4.10. Jumlah Sarana Kesehatan Di Kecamatan Gantarang Tahun 2014.....	86
Tabel 4.11. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	91
Tabel 4.12. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia Responden.....	92

Tabel 4.13. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	93
Tabel 4.14. Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	94
Tabel 4.15. Perubahan Pemanfaatan Lahan Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali.....	96
Tabel 4.16. Distribusi Persepsi Terhadap Hubungan Sosial	100
Tabel 4.17. Distribusi Persepsi Terhadap Konflik Sosial	102
Tabel 4.18. Distribusi Persepsi Terhadap Interaksi Masyarakat	104
Tabel 4.19. Distribusi Persepsi Terhadap Tingkat Pendidikan	105
Tabel 4.20. Distribusi Persepsi Terhadap Kepemilikan Status Lahan	107
Tabel 4.21. Distribusi Persepsi Terhadap Kepemilikan Barang Berharga.....	108
Tabel 4.22. Distribusi Persepsi Terhadap Mata Pencaharian.....	111
Tabel 4.23. Distribusi Persepsi Terhadap Tingkat Pendapatan.....	113
Tabel 4.24. Distribusi Persepsi Terhadap Tingkat Kesejahteraan.....	114
Tabel 4.25. Matriks Perbedaan Formasi Sosial Penduduk Pendetang dengan Penduduk Lokal	118
Tabel 4.26. Matriks Perbedaan Struktur Sosial Penduduk Pendetang dengan Penduduk Lokal	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Fikir	46
Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian	51
Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba	68
Gambar 4.2. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bulukumba	69
Gambar 4.3. Kondisi Permukiman di Lokasi Penelitian.....	87
Gambar 4.4. Peta Penggunaan Lahan Kawasan Peri Urban Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kota-kota di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan semakin besarnya volume kegiatan pembangunan diberbagai sektor. Akan tetapi, dinamika perkembangan kota memiliki perbedaan antara satu kota dengan yang lainnya meskipun memiliki kecenderungan yang relatif sama. Perbedaan perkembangan kawasan perkotaan mengindikasikan terjadinya disparitas antar kawasan perkotaan.

Kota Bulukumba dalam kedudukannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Ibukota Kabupaten mengalami perkembangan yang cukup signifikan hal ini ditandai dengan jumlah penduduk yang mendiami Kota Bulukumba yang cukup tinggi yakni sebesar 73.101 Jiwa. Dinamika perkembangan Kota Bulukumba bercirikan hampir sama dengan perkembangan kota-kota lainnya di Indonesia, yakni lebih karena disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang berbanding terbalik dengan jumlah lahan perkotaan yang terbatas yang mendorong terjadinya ekspansi lahan perkotaan ke wilayah pinggiran atau biasa disebut sebagai wilayah peri urban. Ekspansi wilayah perkotaan ke wilayah peri urban tentu saja akan mengubah bentuk penggunaan lahan ataupun fungsi ruang di wilayah pinggiran.

Perubahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan dan secara khusus di pinggiran Kota Bulukumba ditandai dengan alih fungsi guna lahan pertanian ke arah industrial perkotaan yang dicirikan dengan pemanfaatan ruang yang cukup kompleks antara lain kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kawasan perkantoran. Penurunan luas lahan pertanian di wilayah ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat hal ini akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan kekotaan maupun kehidupan kedesaan. Mengingat wilayah ini merupakan wilayah yang akan berubah menjadi kota sepenuhnya di masa mendatang maka perlu komitmen dari penentu kebijakan untuk mengelola dan menata WPU agar menjadi kota yang ideal sesuai dengan konsep kota yang berkelanjutan (Yunus, 2008).

Perubahan pemanfaatan ruang kawasan pinggiran Kota Bulukumba dicirikan dengan berlangsungnya transformasi spasial terkait dengan bentuk pemanfaatan lahan pertanian, selain dari hilangnya ataupun berkurangnya luas lahan pertanian juga terkait dengan gejala komersialisasi dan intensifikasi pertanian serta penurunan produksi dan produktivitas. Lebih lanjut dikatakan bahwa transformasi ruang di wilayah peri urban juga berpengaruh terhadap kondisi sosio kultural di lingkungan masyarakatnya. Gejala yang muncul adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan, gejala dekohesivitas sosial, terjadinya pendepakan petani ke wilayah lain, gejala diversifikasi mata pencaharian, gejala pengurangan jumlah petani dan perubahan gaya hidup, Yunus (2008).

Gejala yang muncul akibat proses transformasi spasial di wilayah pinggiran Kota Bulukumba ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah petani

dan munculnya permukiman kumuh di beberapa tempat di wilayah peri urban tersebut yang menandai terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang ada. Pada sisi yang lain gejala dekohesivitas sosial ditandai dengan semakin terjadinya sifat individualistis masyarakat di kawasan pinggiran akibat perubahan fungsi ruang yang awalnya bercirikan perdesaan kemudian berubah kearah perkotaan.

Ekspansi wilayah Kota Bulukumba yang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba menetapkan 3 (tiga) desa dan 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Gantarang sebagai bagian dari perluasan kota. Akan tetapi, kawasan yang menjadi konsentrasi pengembangan kota mencakup dua desa yaitu Desa Paenrelompoe dan Desa Polewali. Munculnya gejala dekohesivitas sosial dan gejala lain pada kedua desa tersebut terbentuk dari perkembangan Kota Bulukumba.

Isu-isu strategis dari pengembangan Kota Bulukumba ke wilayah pinggiran seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa munculnya permukiman kumuh di beberapa tempat di kawasan pinggiran, terjadinya dekohesivitas sosial seperti munculnya sifat individualistis masyarakat dan berkurangnya interaksi sosial, berubahnya sistem sosial yang ada sebelumnya dan terjadinya perubahan orientasi mata pencaharian masyarakat setempat. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian terhadap gejala yang muncul sebagian besar akibat perubahan fungsi ruang di kawasan pinggiran Kota Bulukumba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi ruang bekerja sebagai determinan perubahan kondisi sosial masyarakat?
2. Bagaimana dampak perubahan fungsi ruang terhadap kondisi ekonomi masyarakat setempat?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis sejauh mana fungsi ruang bekerja sebagai determinan perubahan kondisi sosial masyarakat.
2. Menganalisis dampak yang timbul dari perubahan fungsi ruang terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Guna Laksana

- a) Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bulukumba khususnya bidang penataan ruang agar lebih meningkatkan unsur perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pada daerah baru pengembangan perkotaan, yang apabila terjadi percepatan pembangunan luasan areal perkotaan khususnya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman agar melihat implikasi secara sosiokultural serta implikasi ekonomi yang ditimbulkan akibat

pembangunan di kawasan pinggiran kota, agar persoalan transformasi secara fisik, sosial, maupun ekonomi tidak memberikan efek negatif terhadap ruang maupun kehidupan masyarakat di lokasi tersebut.

- b) Bagi masyarakat setempat, sebagai bahan pertimbangan dalam menghadapi migran yang masuk ke wilayah mereka sehingga gejala-gejala dekohesivitas sosial bisa dikurangi.

2. Aspek Keilmuan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan bahan pertimbangan dalam proses perencanaan tata ruang khususnya pada kawasan pinggiran terkait dengan perubahan fungsi ruang yang merekonstruksi perubahan sosial ekonomi masyarakat.

E. Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah kawasan Kota Bulukumba yang terdapat di Kecamatan Gantarang Desa Paenrelompoe dan Desa Polewali. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena pada dua desa inilah terjadi konsentrasi pengembangan wilayah kota Bulukumba dan pada kawasan inilah perubahan fungsi ruang terjadi secara signifikan, sehingga dari perumahan fungsi ruang yang terjadi apakah memberikan kontribusi terhadap kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat.

2. Ruang Lingkup Substansi

Penelitian ini sebatas pada pengkajian untuk mengetahui bagaimana perubahan fungsi ruang dalam hal ini permukiman dan perdagangan sebagai fungsi dominan setelah terjadinya perubahan fungsi ruang menjadi determinan dalam perubahan kondisi sosial masyarakat dan bagaimana dampak perubahan fungsi ruang tersebut terhadap kondisi ekonomi masyarakat setempat.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian baik ruang lingkup wilayah penelitian maupun ruang lingkup materi penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan implikasi perubahan pemanfaatan ruang terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai pendekatan penelitian, data penelitian dan analisis data yang digunakan untuk meneliti dampak perubahan pemanfaatan ruang terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang membahas, Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba, Gambaran Lokasi Penelitian, Karakteristik Responden, Fungsi Ruang Bekerja sebagai Determinan Perubahan Kondisi

Sosial Masyarakat, dan Dampak Perubahan Fungsi Ruang terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Setempat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran terhadap hasil dan temuan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Kota

Dalam pengertian geografis, kota itu adalah suatu tempat yang penduduknya rapat, rumah-rumahnya berkelompok kelompok, dan mata pencaharian penduduknya bukan pertanian. Sementara menurut Bintarto, 1987, kota dalam tinjauan geografi adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di belakangnya. Tinjauan ini masih sangat kabur dalam arti akan sulit untuk menarik batas yang tegas untuk mendefinisi kota dan membedakannya dari wilayah desa apabila menginginkan tinjauan tersebut. Tinjauan di atas merupakan batasan kota dari segi sosial. Dalam perkembangannya, konsep-konsep kota paling tidak dapat dilihat dari empat sudut pandang, yaitu segi fisik, administratif, sosial dan fungsional. Dengan banyaknya sudut pandang dalam membatasi kota, mengakibatkan pemahaman kota dapat berdimensi jamak dan selama ini tidak satupun batasan tolak ukur kota yang dapat berlaka secara umum.

Kota dalam tinjauan fisik atau morfologi menekankan pada bentuk-bentuk kenampakan fisik dari lingkungan kota. Smailes (1955) dalam Yunus (1994) memperkenalkan 3 unsur morfologi kota yaitu penggunaan lahan, pola-pola jalan

dan tipe atau karakteristik bangunan. Sementara itu Conzen (1962) dalam Yunus (1994) juga mengemukakan unsur-unsur yang serupa dengan dikemukakan Smailes, yaitu *plan, architectural style and land use*.

Berdasarkan pada berbagai macam unsur morfologi kota yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa secara umum unsur-unsur morfologi kota berkisar antara karakteristik bangunan, pola jalan dan penggunaan lahan. Unsur-unsur ini yang paling sering digunakan untuk mengenali suatu daerah secara morfologis, kota atau bukan.

Secara garis besar ada tiga macam proses perluasan areal kekotaan (*urban sprawl*) menurut Hadi Sabari Yunus, yaitu:

a. Perembetan konsentris

Tipe pertama ini dikemukakan oleh Haevey Clark dengan. Jenis perembetan ini berlangsung paling lambat karena perembetan berjalan perlahan-lahan terbatas pada semua bagian luar kenampakan fisik kota. Proses perembetan ini menghasilkan bentuk kota yang relatif kompak dan peran transportasi tidak begitu besar.

b. Perembetan memanjang

Tipe ini dikenal dengan ribbon development linear yang menunjukkan, ketidakmerataan perembetan areal perkotaan di semua bagian sisi luar dari kota utarna. Perernbetan paling cepal terlillat disepapJang jalur transportasi yang ada, khususnya yang bersifat menjari dari pusat kota.

c. Perembetan yang meloncat

Tipe ini dikenal sebagai leaf ftog development dan dianggap paling merugikan. Hal ini karena perembetan ini tidak efisien dalam arti ekonomis, tidak mempunyai estetika dan tidak menarik. Perkembangan lahan terjadi berpencaran secara sporadis dan menyulitkan pemerintah kota untuk membangun prasarana fasilitas kebutuhan hidup penduduknya. Tipe ini sangat cepat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan pertanian, memunculkan kegiatan spekulasi lahan, dan menyulitkan upaya penataan ruang kota

2. Konsep Pengembangan Kota

a. Teori Pusat Pertumbuhan

Konsep pusat-pusat pertumbuhan pertama kali diperkenalkan oleh Francois Perroux (1955) dengan istilah growth pole atau pole de croissance (kutub pertumbuhan). Konsep ini erat hubungannya dengan konsep central place-nya Christaller (1933) dan konsep heksagonal-nya August Losch (1944). Pola pemikiran Christaller dan Losch dipengaruhi oleh teori Von Thunen (1926) dan Alfred Weber (1909). Dalam konsepnya tersebut, Perroux menyatakan bahwa pertumbuhan tidak terjadi secara serentak; pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah; perkembangan itu menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dan dengan efek yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian (Jayadinata, 1999).

Bertitik tolak dari konsep growth pole dari Perroux ini muncul konsep-konsep serupa yaitu kutub-kutub pengembangan (development poles), pusat-pusat pertumbuhan (growth centres), titik-titik pertumbuhan (growth points), daerah-daerah pertumbuhan (growth areas), zona-zona pertumbuhan (growth zones) dan core region yang pada prinsipnya bermaksud sama yaitu untuk mendorong perkembangan daerah. Letak perbedaannya adalah bahwa konsep kutub pertumbuhan tanpa suatu dimensi geografik yang spesifik, sedangkan konsep pusat-pusat pertumbuhan, titik-titik pertumbuhan, maupun core region berkenaan dengan dimensi geografik atau lokasi spasial (Glasson, 1977).

Konsep pusat-pusat pertumbuhan mengandung pengertian adanya suatu hubungan saling mempengaruhi secara timbal balik antara pusat-pusat tersebut dengan daerah pengaruhnya. Pusat-pusat itu sendiri berada pada suatu jenjang tertentu yang terdiri atas pusat pertumbuhan pertama, pusat pertumbuhan kedua, dan seterusnya. Menurut teori ini pertumbuhan akan dapat dijalarkan dari pusat pertama ke pusat kedua dan seterusnya melalui mekanisme yang disebut *spread effect* oleh Gunnar Myrdal (Myrdal, 1976) atau disebut *trickling down effect* oleh Hirschman (Hirschman, 1958), yaitu gaya-gaya yang mendorong perkembangan ke daerah pengaruhnya yang biasanya merupakan daerah yang relatif kurang berkembang.

Dalam pengembangan daerah melalui pusat-pusat pertumbuhan, kegiatan akan disebar ke beberapa pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan hirarki dan fungsinya. Pada skala regional dikenal tiga orde, yaitu:

1) Pusat pertumbuhan primer (utama).

Pusat pertumbuhan primer atau pusat utama orde satu ialah pusat utama dari keseluruhan daerah, pusat ini dapat merangsang pusat pertumbuhan lain yang lebih bawah tingkatannya. Biasanya pusat pertumbuhan orde satu ini dihubungkan dengan tempat pemusatan penduduk terbesar, kelengkapan fasilitas dan potensi aksesibilitas terbaik, mempunyai daerah belakang terluas serta lebih multi fungsi dibandingkan dengan pusat-pusat lainnya.

2) Pusat pertumbuhan sekunder (kedua).

Pusat pertumbuhan sekunder ini adalah pusat dari sub-daerah, seringkali pusat ini diciptakan untuk mengembangkan sub-daerah yang jauh dari pusat utamanya. Perambatan perkembangan yang tidak terjangkau oleh pusat utamanya dapat dikembangkan oleh pusat pertumbuhan sekunder ini.

3) Pusat pertumbuhan tersier (ketiga).

Pusat pertumbuhan tersier ini merupakan titik pertumbuhan bagi daerah pengaruhnya. Fungsi pusat tersier ini ialah menumbuhkan dan memelihara kedinamisan terhadap daerah pengaruh yang dipengaruhi (Friedmann, 1966). Manfaat konsep pusat-pusat pertumbuhan sebagai alat kebijaksanaan dalam perencanaan regional telah cukup lama disadari. Akan tetapi relevansinya tidak hanya terbatas pada daerah-daerah yang mengalami kemunduran saja, karena pada awal tahun 1964 telah disarankan suatu kebijaksanaan yang mengkonsentrasikan semua pertumbuhan industri dalam sejumlah kecil pusat besar bagi daerah makmur (Glasson, 1977).

Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut juga telah mendapat sambutan yang menyenangkan di negara-negara yang sedang berkembang. Beberapa contoh yang terkenal adalah kompleks industri Bari Toronto-Brindisi untuk daerah Mezzogiorno di Italia Selatan, dan pembangunan pusat-pusat baru di Brasilia dan Ciudad Guyana sebagai usaha untuk menimbulkan pertumbuhan ke dalam daerah-daerah yang terbelakang di Brasilia dan Venezuela. Gagasan ini juga telah diterima di Amerika Serikat untuk membantu daerah-daerahnya yang mengalami kemunduran (Glasson, 1977).

b. Teori Lokasi Pertumbuhan

Teori lokasi merupakan cabang ilmu ekonomi regional paling tua yang dikembangkan sejak abad kesembilan belas (H.W. Richardson, 1979). Teori ini diilhami oleh pertanyaan Weber (1929), yaitu orang yang pertama kali mengajukan pertanyaan mengapa pabrik-pabrik cenderung berlokasi saling berdekatan. Teori lokasi adalah teori yang menjelaskan di mana dan bagaimana suatu aktivitas ekonomi memilih lokasinya secara optimal. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah penting bagi para pengambil keputusan publik, perencana-perencana lembaga perdagangan eceran (yang ingin membuat pilihan lokasi yang tepat) maupun pengembang-pengembang komunitas serta real estate, yang berharap untuk dapat menarik bisnis ke kawasan-kawasan mereka (Soepono, 1999). Dengan demikian lokasi perusahaan-perusahaan atau kegiatan ekonomi memerankan peranan penting bagi lokasi daerah/kota-kota. Keputusan-keputusan lokasi perusahaan-perusahaan

dan aktivitas ekonomi seharusnya menyebabkan timbul dan berkembangnya kota-kota dan daerah-daerah.

Pemilihan lokasi aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor lokasi. Faktor-faktor lokasi adalah faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi suatu aktivitas ekonomi, seperti aktivitas produksi atau aktivitas pemberian jasa. Setiap organisasi dari aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor lokasi. Dengan kata lain, faktor-faktor lokasi adalah variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan lokasi (Soepono, 1991). Faktor-faktor lokasi menurut Soepono (1999), dapat dikelompokkan menjadi dua orientasi yaitu, pertama, orientasi transportasi, yang dimaksud dengan orientasi transportasi adalah bahwa transportasi merupakan porsi terbesar dari biaya total dari organisasi suatu aktivitas ekonomi, sehingga menjadi penentu keputusan lokasi. Faktor-faktor lokasi yang berorientasi transportasi antara lain; faktor transportasi, faktor sumber daya, faktor pasar, dan faktor tenaga kerja. Kedua, orientasi masukan lokal, yang dimaksud dengan orientasi masukan lokal adalah bahwa masukan lokal itulah yang merupakan persentase terbesar dari biaya total dan disebut ke lokasi lain. Faktor-faktor lokasi yang berorientasi masukan lokal antara lain; faktor energi, faktor kenyamanan (mutu hidup, kualitas hidup atau gaya hidup), faktor aglomerasi, pelayanan publik setempat, pajak, insentif pemerintah (pusat dan daerah), iklim bisnis setempat, *site costs* (harga tanah dan gedung, fasilitas perkantoran dan gedung), dan stabilitas atau iklim politik

c. Proses Perkembangan Kota Secara Spasial

Ditinjau dari prosesnya, perkembangan spasial secara fisik tampak ada 2 (dua) macam bentuk perkembangan yang dapat diidentifikasi, yaitu proses perkembangan spasial secara horizontal dan perkembangan spasial secara vertikal.

1) Proses Perkembangan spasial secara horizontal

Didalam studi kota proses ini menjadi penentu bertambahnya luasan areal kekotaan dan makin padatnya bangunan di bagian dalam kota sehingga secara defenitif dapat dirumuskan sebagai proses penambahan ruang yang terjadi secara mendatar dengan menempati ruang-ruang yang masih kosong baik didaerah –daerah pinggiran kota maupun bagian dalam kota. Perkembangan keruangan secara horizontal terdiri dari proses perkembangan spasial secara sentripugal dan perkembangan spasial secara sentripetal. Dua macam perkembangan kota ini merupakan proses perkembangan spasial utama yang menandai bentuk perkembangan kota di Negara yang sedang berkembang.

a) Proses Perkembangan Spasial Sentripugal

Proses ini tidak lain adalah suatu proses bertambahnya ruang kekotaan yang berjalan keluar dari daerah kekotaan yang ada dan mengambil tempat di daerah pinggiran kota. Dalam prosesnya perkembangan spasial secara sentripetal dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Faktor aksesibilitas

Faktor aksesibilitas mempunyai peranan yang cukup besar terhadap perubahan pemanfaatan lahan, khususnya perubahan pemanfaatan lahan secara agraris menjadi non agraris di wilayah pinggiran kota.

- Faktor pelayanan umum

Faktor ini merupakan faktor penarik terhadap penduduk dan fungsi-fungsi kota datang kearahnya.

- Faktor karakteristik lahan

Faktor ini mempunyai peranan dalam mempengaruhi intensitas perkembangan baru disuatu kota.

- Faktor karakteristik pemilik lahan

Faktor ini berpengaruh terhadap penentuan corak perkembangan spasial disuatu tempat, khususnya akselerasi intensitas perkembangannya.

- Faktor keberadaan peraturan-peraturan yang mengatur tata guna lahan

Faktor ini diyakini sebagai salah satu faktor yang berpengaruh kuat terhadap intensitas perkembangan spasial didaerah pinggiran kota apabila peraturan yang ada dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (Sinclair, 1967 dalam Yunus, 2008)

- Faktor pemrakarsa pengembang

Faktor ini mempunyai peranan yang kuat dalam mengarahkan pengembangan spasial sesuatu kota.

b) Proses Perkembangan Spasial Sentripetal

Proses perkembangan spasial sentripetal adalah suatu proses penambahan bangunan-bangunan kekotaan yang terjadi dibagian dalam kota (*the inner parts of the city*). Proses ini terjadi pada pada lahan-lahan yang masih kosong dibagian dalam kota, baik berupa lahan yang terletak diantara bangunan-bangunan yang sudah ada, maupun pada lahan-lahan terbuka lainnya (Yunus, 2008).

Proses perkembangan spasial sentripetal adalah proses penambahan ruang untuk menampung kegiatan dengan mendirikan struktur bangunan-bangunan kekotaan yang terjadi dibagian dalam kota dan hal ini mengambil tempat di bagian-bagian yang memungkinkan dibangunnya struktur fisik dan bagian ini terletak diantara bagian-bagian yang suda terbangun. Ada dua macam jenis perkembangan spasial secara sentripetal ini yaitu perkembangan secara horisontal dan perkembangan secara vertikal. Perkembangan secara horisontal adalah proses penambahan ruang untuk mengakomodasikan kegiatan dengan cara mendirikan bangunan secara mendatar pada bagian-bagian yang masih kosong dibagian dalam kota dalam bentuk bangunan tidak bertingkat. Perkembangan vertikal adalah bentuk penambahan ruang dibagian dalam kota dengan cara membangun bangunan bertingkat dengan tujuan memperoleh ruang yang lebih luas untuk mengakomodasikan kegiatan.

2) Proses perkembangan spasial secara vertikal.

Gejala perkembangan spasial kota secara vertikal adalah proses penambahan ruang kota dengan menambahkan jumlah lantai bangunan pada bangunan tertentu sehingga luas lantai bangunan akan semakin luas seiring dengan bertambah banyaknya lantai bangunan tersebut.

Bangunan-bangunan yang terbentuk adalah bangunan – bangunan bertingkat dari tingkat dua sampai puluhan tingkat yang kemudian dikenal dengan *skycrapes*. Oleh karena tingginya bangunan yang menjulang seolah-olah mencapai langit, sehingga dijuluki gedung pencakar langit. Gejala munculnya gedung bertingkat ini banyak seiring dengan kemajuan di bidang teknologi konstruksi bangunan serta makin langkanya ruang dibagian dalam kota untuk mengakomodasikan kegiatan yang terus berkembang.

3. Teori Perubahan Pemanfaatan Lahan

Pengertian konversi lahan atau perubahan guna lahan adalah alih fungsi atau mutasi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lain (Tjahjati, 1997 dalam Yusran, 2006). Dalam lingkup internal kota, perubahan pemanfaatan lahan merupakan fenomena yang lazim terjadi seiring dengan dinamika perkembangan kota yang dihadapkan pada keterbatasan lahan untuk mewadahnya. Perubahan pemanfaatan ini terjadi baik dari lahan yang pemanfaatannya bersifat tidak terbangun menjadi kawasan terbangun, maupun dari satu jenis pemanfaatan lahan ke jenis pemanfaatan lahan dalam kawasan terbangun kota (Kombaitan dkk, 2000)

a. Faktor Penyebab Perubahan Pemanfaatan Lahan

Penyebab perubahan pemanfaatan lahan menurut Charles C. Colby dapat disebabkan oleh dua faktor yang saling berlawanan (Kustiwan, 2000 dalam Rachmat Triadi, 2012):

- 1) Gaya sentrifugal, mendorong kegiatan berpindah dari pusat kota ke wilayah pinggiran.
- 2) Gaya sentripetal, bekerja menahan fungsi-fungsi tertentu di pusat kota dan menarik fungsi lain ke dalamnya.
- 3) Daya Tarik Fungsional, Daya tarik yang dikemukakan dengan pengelompokan unit-unit fungsional pada unit-unit lain yang mempunyai tipe sama menunjukkan tipe lain dari daya tarik fungsional. Alrahman (1989) dalam Rachmat Triadi, (2012), menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan berbelanja, umumnya konsumen dipengaruhi oleh potensi dari tempat perbelanjaan yang salah satunya adalah daya tarik lokasi. Daya tarik tersebut adalah: kondisi lingkungan, fungsi persinggahan dan image.
- 4) Gengsi Fungsional, Berkembangnya reputasi dari suatu jalan atau lokasi yang merupakan akibat adanya fungsi tertentu, seperti terdapatnya restoran, toko, praktek dokter, dll.
- 5) Persamaan Manusiawi, Faktor ini dapat bekerja sebagai gaya sentripetal maupun sentrifugal, yaitu dengan menilai/memandang gaya yang ada dipusat

kota sebagai daya tarik atau sebaliknya. Misalnya saja, pajak bumi dan bangunan (PBB) di pusat kota yang tinggi dapat membuat seseorang pindah dari pusat kota (sentrifugal) karena keuntungan yang diperoleh dari kegiatannya tidak ekonomis, tetapi dapat menahan orang lainnya untuk tetap tinggal (gaya sentripetal) karena keuntungan yang diperoleh dari kegiatannya masih lebih besar dari pajak yang harus dibayai.

b. Bentuk, Karakteristik, dan Jenis Perubahan Pemanfaatan Lahan

Menurut Oktavia (1998) dan Ibrahim (1991) dalam Supardi (2008) menyebutkan bahwa ada tiga jenis perubahan pelanggaran terhadap dokumen rencana kota, yaitu:

- 1) Perubahan fungsi, yaitu perubahan yang tidak sesuai dengan fungsi lain yang telah ditetapkan dalam rencana, yaitu fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota.
- 2) Perubahan blok peruntukan, yaitu pemanfaatan yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan yang telah ditetapkan, yaitu perubahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) tiap blok yang ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- 3) Perubahan persyaratan teknis, yaitu pemanfaatan sesuai dengan fungsi dan peruntukan, tetapi persyaratan teknis bangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana dan peraturan bangunan setempat, yaitu persyaratan teknis yang

ditetapkan dalam rencana tapak kawasan dan perpetakan yang menyangkut tata letak dan tata bangunan beserta sarana lingkungan.

c. Proses Perubahan Pemanfaatan Lahan

Sejalan dengan dinamika pusat kota, proses perubahan yang terjadi dapat dibagi ke dalam tujuh tahap sebagai berikut (Kombaitan, dkk, 2000) dalam Supardi (2008):

- 1) Proses awal (inception), yaitu mulai berkembangnya suatu kawasan sebagai calon pusat kota bersama-sama mulai berkembangnya suatu kota.
- 2) Proses eksklusi (exclusion), yaitu terjadinya penonjolan nilai lahan tertinggi di pusat kota sehingga kawasan pusat kota menjadi eksklusif.
- 3) Proses segregasi, yaitu terjadinya pemisahan kawasan fungsional baru di luar kawasan pusat kota.
- 4) Proses perluasan (extension), yaitu terjadinya perluasan kawasan pusat kota akibat bertambahnya jumlah kegiatan dan meluasnya jangkauan pelayanan.
- 5) Proses peniruan dan penyesuaian (replication and readjustment), yaitu munculnya fungsi serupa pusat kota, terutama pusat belanja, dipinggiran kota akibat terjadinya perluasan wilayah terbangun kota yang pada gilirannya menimbulkan penyesuaian di pusat lama.
- 6) Proses peremajaan (redevelopment), yaitu dilakukannya peremajaan pusat kota akibat dinamika perubahan karakter maupun kegiatan di dalamnya.

- 7) Realisme kota, yaitu terjadinya hubungan berjenjang di suatu kota, dimana pusat kota menjadi lokasi terpenting sementara kawasan-kawasan lainnya mengurutkan diri dalam jenjang yang lebih rendah.

Terdapat dua tipe dasar perkembangan kota, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan mencakup semua jenis permukiman baru, termasuk di dalamnya permukiman yang sama sekali baru dan perluasan permukiman yang ada. Adapun transformasi adalah perubahan terus-menerus pada bagian perkotaan. Pada dasarnya tahapan dalam suatu proses pengalihan fungsi kawasan yang terjadi terutama dari fungsi perumahan ke fungsi baru adalah sebagai berikut (Bourne,1971) dalam (Supardi,2008):

- 1) Penetrasi, yaitu terjadinya penerobosan fungsi baru ke dalam suatu fungsi yang homogen.
- 2) Invasi, yaitu terjadinya serbuan fungsi baru yang lebih besar dari tahap penetrasi tetapi belum mendominasi fungsi lama.
- 3) Dominasi, yaitu terjadinya perubahan dominan proporsi fungsi dari fungsi lama ke fungsi baru akibat besarnya perubahan ke fungsi baru.
- 4) Suksesi, yaitu terjadinya pergantian sama sekali dari suatu fungsi lama ke fungsi baru

4. Konsep Wilayah Peri Urban

Daerah pinggiran kota adalah suatu daerah yang juga dikenal sebagai daerah “urban fringe” atau daerah “peri-urban” atau nama lain yang muncul kemudian

merupakan daerah yang memerlukan perhatian yang serius karena begitu pentingnya daerah tersebut terhadap peri kehidupan penduduk baik desa maupun kota di masa yang akan datang. Daerah pinggiran kota ini adalah wilayah yang terletak di antara dua wilayah yang sangat berbeda kondisinya, yaitu antara wilayah yang mempunyai kenampakan kekotaan di satu sisi dan wilayah yang mempunyai kenampakan kedesaan di sisi yang lain. Oleh karena wilayah kota dan desa mempunyai dimensi kehidupan yang pada umumnya menunjukkan atribut yang saling berbeda, maka di daerah antara ini kemudian muncul atribut khusus yang merupakan hibrida dari keduanya (Yunus, 2008).

Sedangkan istilah peri urban merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang sudah sangat umum dikenal. Istilah peri urban akan selalu digunakan, karena padanan istilah dalam bahasa Indonesia belum ditemukan secara pas. Di samping hal tersebut, istilah ini sudah banyak dikenal secara internasional sehingga dalam kapasitas ilmu perencanaan wilayah tidak merasa kebingungan dan canggung lagi digunakan. Istilah peri urban merupakan kata sifat (adjective) sehingga istilah ini tidak dapat digunakan berdiri sendiri tanpa ada kata bendanya, karena kata sifat pada hakikatnya menjelaskan kata benda.

Dengan demikian, istilah peri adalah merupakan kata sifat yang dapat diberi makna pinggiran atau sekitar dari sesuatu objek tertentu. Sementara itu istilah urban juga merupakan kata sifat yang berarti sifat kekotaan atau sesuatu yang berkenaan dengan kota. Penggabungan istilah peri dan urban membentuk kata sifat baru yang secara harfiah berarti sifat kekotaan dan sekitar sehingga apabila digabungkan

dengan kata region, maka kata peri urbanregion mempunyai makna sebagai suatu wilayah yang berada di sekitar kota. Oleh karena makna kata sekitar sangat tidak jelas luasannya, maka perlu penjelasan agar penggunaan istilah tersebut tepat adanya. Oleh karena kata sekitar selalu dikaitkan dengan pengaruh kota, maka kata kunci inilah yang kemudian digunakan oleh para peneliti untuk mengenalinya. Betapapun kecilnya pengaruh kekotaan ini selalu digunakan sebagai indikator wilayah peri urban (WPU), sehingga kemudian dikemukakan bahwa WPU itu sebenarnya merupakan wilayah yang berada di antara wilayah kekotaan dan wilayah kedesaan (Yunus, 2008).

5. Teori Tentang Perubahan Sosial

Perubahan fisik spasial kota akan selalu terkait dengan pembentukan struktur ruang perkotaan, yang mendorong berlangsungnya proses perubahan sosial. Proses pembentukan struktur ruang kota bertitik tolak dari keberadaan “ekonomi kapitalis”, dimana proses dan hubungan fungsional yang ada di dalam kota merupakan produk dari sistem ekonomi kapitalis (Surya. B, 2011).

Perubahan fisik spasial pada kawasan pinggiran kota, didorong oleh daya gerak kapitalisme untuk melakukan perubahan struktur ruang kota, dari produksi ke reproduksi ruang yang pada akhirnya mengondisikan berkembangnya kelas-kelas sosial berdasarkan tingkat pendapatan dan prestise. Ketersediaan lahan perkotaan yang semakin terbatas dan semakin kuatnya penguasaan lahan oleh kapitalisme mengondisikan perubahan fisik spasial kota yang bersifat revolusioner. Dengan demikian diasumsikan bahwa lahan memiliki nilai ekonomi strategis, (Yunus, 2008)

a. Tahapan Perubahan Sosial

Awal mula perubahan sosial sebagian besar adalah respons terhadap adanya atau derajat disorganisasi sosial, atau apabila berlaku ketegangan dalam sistem sosial maka diperlukan penyesuaian baru. Setiap proses yang termasuk kategori adalah bersumber dari pola tingkah laku dan sikap baru. Inovasi dapat dikenalkan dengan berbagai cara, secara paksa atau damai, cepat ataupun gradual, direncanakan dan tak berencana. Dengan demikian inovasi akan tergantung oleh kepentingan dari kebutuhan sosial, kepentingan warga masyarakat dan derajat disorganisasi penerima difusi inovasi (Surya. B, 2011).

Perubahan sosial pada umumnya bisa berasal dari berbagai sumber. Perubahan ekologis, penemuan-penemuan, dan inovasi teknologi apabila diterapkan dalam skala yang cukup besar, mungkin akan menimbulkan suatu tatanan baru dalam kehidupan ekonomi, dan dengan demikian bisa menimbulkan perubahan menuju kebiasaan-kebiasaan berpikir dan bertindak, (Soemardjan, 1990).

Lebih jauh Soemardjan (1990), menerangkan perubahan sosial dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu perubahan yang disengaja dan perubahan yang tidak disengaja. Perubahan sosial yang disengaja adalah perubahan yang telah diketahui dan direncanakan sebelumnya oleh para anggota masyarakat yang berperan sebagai pelopor perubahan. Perubahan yang tidak disengaja sebaliknya ialah perubahan yang terjadi tanpa diketahui atau direncanakan sebelumnya oleh seseorang anggota masyarakat.

Tahapan perubahan sosial ekonomi Soemarjan (1990) menyimpulkan bahwa hasrat akan perubahan sosial bisa berubah menjadi tindakan untuk mengubah kalau ada rangsangan yang cukup kuat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang merintangai tahap permulaan proses perubahan.

Ada empat tahapan yang disimpulkan oleh park, tentang penyatupaduan etnik yang membawa perubahan sosial, yaitu:

- Konflik
- Persaingan
- Akomodasi
- Asimilasi

Keanekaragaman dalam kegiatan sosial-ekonomi di suatu daerah merupakan sumber kekuatan dalam menghadapi fluktuasi ekonomi. Kalau ekonomi daerah tergantung kepada satu komoditi saja, penduduknya akan menderita lebih banyak kalau permintaan akan penghasilan itu hilang. Sebaliknya daerah yang sumber penghasilannya luas dapat dianggap sehat dan lebih kuat ekonominya (Kartodirdjo, 1994).

Jika dilihat dalam skala yang lebih kecil yaitu rumah tangga, maka dari pernyataan Kartodirejo tersebut diatas dapat dikatakan bahwa apabila rumah tangga yang tidak mengandalkan pendapatan dari satu sumber saja, maka kondisi sosial ekonominya akan lebih sehat dan kuat dalam menghadapi fluktuasi ekonomi.

Menurut Usman (1998), sebelum menentukan variabel ekonomi yang perlu dikaji, terlebih dahulu perlu diidentifikasi input dari suatu usaha atau kegiatan yang akan diintroduksi. Input tersebut antara lain mencakup kesempatan kerja yang tersedia, kesempatan untuk menambah pendapatan, munculnya organisasi-organisasi dan peraturan-peraturan baru serta kemungkinan adanya gangguan pada sumberdaya alam yang ada. Input tersebut amat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitar usaha atau kegiatan.

Lebih jauh dikatakan Usman (1998) bahwa dalam melihat dampak dari suatu usaha atau kegiatan terdapat tiga isu pokok, yaitu: perubahan pola usaha ekonomi keluarga, perubahan pola kegiatan usaha, dan perubahan situasi kerja. Atas dasar tiga isu pokok tersebut, dapat ditentukan sekurang-kurangnya tiga variabel kunci, yaitu: pola usaha ekonomi, waktu kegiatan usaha ekonomi, serta kesempatan kerja.

b. Hirarki teori kebutuhan

Hirarki teori kebutuhan berangkat dari hipotesis bahwa setiap diri manusia terdapat hirarki dari lima kebutuhan Maslow (Robbins, 2008). Hirarki tingkat kebutuhan manusia yaitu:

- 1) Fisiologi: meliputi rasa lapar, haus, berlindung, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya
- 2) Rasa Aman: meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional;
- 3) Sosial: meliputi rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan dan persahabatan;
- 4) Penghargaan: meliputi faktor – faktor penghargaan internal seperti otonomi

dan pencapaian dan faktor – faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan dan perhatian, dan;

- 5) Aktualisasi diri: dorongan untuk menjadi seseorang sesuai kecakapannya meliputi pertumbuhan, pencapaian pertumbuhan seseorang dan pemenuhan diri sendiri.

Dasar teori hirarki kebutuhan pada intinya menyebutkan bahwa individu bergerak menaiki tingkat hirarki. Dari sudut motivasi, menyebutkan bahwa meskipun tingkat kebutuhan yang benar – benar terpenuhi, akan tetapi pemenuhan hirarki kebutuhan ditujukan memahami kondisi dan situasi dimana orang-orang tersebut berada dan focus untuk memenuhi kebutuhannya.

6. Hakikat Perubahan Sosial

Jika kita melakukan kilas balik, tiga atau empat tahun yang lalu, dibandingkan dengan apa yang terjadi pada saat ini, maka akan ada banyak perubahan yang sudah terjadi, baik yang direncanakan atau tidak, kecil atau besar, serta cepat atau lambat.

Jelas bahwa semuanya sudah berubah. Tidak ada yang statis. Semuanya telah mengalami perubahan, sesuai tuntutan zaman. Beberapa tahun yang lalu, orang masih jarang menggunakan telepon genggam (HP). Namun saat ini, kebanyakan orang sudah memiliki alat tersebut atau paling tidak mereka sudah mengenal alat komunikasi tersebut. Penggunaan alat tersebut memiliki pengaruh pada cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Kita tidak perlu lagi ke rumah atau waning telepon

untuk berkomunikasi dengan orang lain di tempat yang jauh. Dengan telepon genggam kita bisa berkomunikasi sambil berjalan, berbelanja, dan sebagainya.

Bila kita perhatikan satu-persatu, maka akan ada banyak perubahan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat dapat kita sebut sebagai perubahan sosial.

a. Pengertian Perubahan Sosial

Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan tersebut merupakan proses modifikasi struktur sosial dari pola budaya dalam suatu masyarakat. Pernyataan yang terjadi dalam masyarakat disebut perubahan sosial, yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa pada setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan. Manusia selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Ia selalu mencari sesuatu yang baru, bagaimana mengubah suatu keadaan agar lebih baik. Manusia merupakan makhluk yang selalu ingin berubah, aktif, kreatif, inovatif, agresif, selalu berkembang, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Perbedaan perubahan antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain atau antara kurun waktu yang satu dan kurun waktu lainnya hanyalah terletak pada tingkat kecepatan perubahan tersebut. Perubahan yang terjadi di masyarakat meliputi perubahan norma-norma sosial, pola-pola sosial, Interaksi sosial, pola-pola perilaku,

organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat. serta susunan kekuasaan dan wewenang.

Perubahan sosial tidak terlepas dari perubahan kebudayaan. Kingsley Davis mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagiannya, yaitu kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, bahkan perubahan dalam bentuk serta aturan organisasi sosial. Sebagai contoh, perubahan dalam bidang teknologi komunikasi dari bentuk telegram hingga telepon seluler (*handphone*). Akan tetapi, perubahan itu tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Perubahan tersebut lebih merupakan perubahan kebudayaan ketimbang perubahan sosial.

Secara teoretis, perubahan sosial dan perubahan kebudayaan dapat dipisahkan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah menentukan garis pemisah antara keduanya karena tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Sebaliknya, tidak mungkin ada kebudayaan tanpa ada masyarakat sebagai pendukungnya.

Perubahan sosial dan kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama, yaitu berhubungan dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau perbaikan dalam cara masyarakat memenuhi kebutuhannya.

b. Pandangan Para Tokoh tentang Perubahan Sosial

Perubahan sosial memiliki makna yang sangat luas dan mencakup berbagai segi kehidupan manusia seperti ekonomi, sosial, dan politik. Karena itu, perubahan sosial budaya yang terjadi dalam suatu masyarakat menyangkut perubahan nilai, pola

perilaku, organisasi sosial, pelapisan sosial, kekuasaan, serta segi kemasyarakatan lainnya. Berikut beberapa pandangan para tokoh tentang perubahan sosial.

- Selo Soemardjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
- Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan. Demikian pula dalam organisasi-organisasi lain, seperti organisasi politik maupun organisasi ekonomi.
- John Lewis Gillin dan John Philip Gillin melihat perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
- Samuel Koenig menyatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi ini bisa terjadi karena faktor-faktor intern ataupun ekstern.

- Robert Maclver melihat perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial (*social relationship*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial.
- William F. Ogburn menyatakan bahwa perubahan sosial menekankan pada kondisi teknologis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola berpikir masyarakat.

Perubahan sosial dapat pula berupa kemajuan (*progress*) atau kemunduran (*regress*). Dalam arti kemajuan, perubahan yang terjadi dalam masyarakat mampu menciptakan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan di sini dapat diartikan sebagai proses pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Sebagai kemunduran, perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada aspek tertentu membawa pengaruh yang kurang menguntungkan. Misalnya, penggunaan tenaga mesin di pedesaan mengakibatkan nilai kegotong-royongan masyarakatnya menjadi luntur, bahkan hilang.

Secara sosiologis, kita dapat mengetahui bahwa perubahan sosial akan selalu mengikuti suatu pola dan arah tertentu yang dapat dipelajari. Selama ini para ahli sosiologi telah berupaya untuk mempelajari proses perubahan sosial dan mencoba untuk mengerti sifat dan pola perubahan sosial di dalam masyarakat.

c. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial

Setelah kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan perubahan sosial, kini kita akan melihat bentuk-bentuk perubahan sosial. Paling tidak, ada tujuh bentuk perubahan sosial yang akan kita bahas di sini, yakni bentuk perubahan lambat, perubahan cepat, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, dan perubahan struktural.

1) Perubahan Lambat (Evolusi)

Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Biasanya, perubahan ini merupakan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Proses perubahan seperti ini dinamakan *evolusi*. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat.

2) Perubahan Cepat (Revolusi)

Perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat dinamakan *revolusi*. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu lama. Misalnya, revolusi industri di Inggris merupakan perubahan dari produksi tanpa mesin menuju ke tahap produksi dengan menggunakan mesin. Perubahan tersebut dianggap cepat karena dapat mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, seperti sistem

kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan, dalam waktu yang relatif cepat. Suatu revolusi dapat juga berlangsung dengan didahului suatu pemberontakan, contohnya revolusi kemerdekaan di Indonesia dan Revolusi Prancis.

3) Perubahan Kecil

Perubahan kecil adalah suatu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, perubahan mode pakaian tidak akan membawa pengaruh berarti bagi masyarakat dalam secara keseluruhan.

4) Perubahan Besar

Perubahan besar adalah suatu perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti dalam sistem kerja, sistem hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Contohnya, urbanisasi di kota-kota menimbulkan berbagai perubahan, seperti lahan menjadi sempit. Dampaknya, banyak wanita dan anak-anak menjadi buruh dan pengemis. Dengan demikian, timbul bermacam-macam lembaga hubungan kerja dan lembaga gadai tanah. Selain itu, timbul pula kesenjangan yang dapat memicu konflik yang akhirnya bisa sampai pada tahapan disintegrasi sosial.

5) Perubahan yang Dikehendaki atau Direncanakan

Perubahan yang dikehendaki (*intended change*) atau direncanakan (*planned change*) merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan ini dinamakan pelaku

perubahan (*agent of change*), yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dalam perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial (*social engineering*) atau sering pula dinamakan perencanaan sosial (*social planning*).

6) Perubahan yang Tidak Dikehendaki atau Tidak Direncanakan

Perubahan sosial yang tidak dikehendaki (*unintended change*) atau tidak direncanakan (*unplanned change*) merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Contohnya, kecenderungan pelaksanaan upacara adat perkawinan yang bersifat praktis, tidak seperti pesta adat aslinya. Hal ini sebetulnya tidak dikehendaki masyarakat, tetapi karena alasan-alasan tertentu, seperti biaya yang mahal dan waktu yang cukup lama, akhirnya masyarakat banyak mengikutinya.

Dalam kenyataannya, perubahan yang dikehendaki dengan yang tidak dikehendaki mempunyai kaitan yang erat. Contohnya, kemajuan teknologi pertanian seperti penggunaan traktor. Perubahan ini merupakan perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Bagi para petani, kemajuan atau perubahan tersebut sangat menguntungkan karena menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Namun, timbul akibat sampingan yang memang tidak dikehendaki masyarakat, seperti tidak terlihatnya lagi nilai kebersamaan atau kegotongroyongan warga untuk mengerjakan lahan

pertaniannya. Semakin banyak buruh tani yang kehilangan pekerjaannya karena tenaganya telah digantikan oleh mesin.

7) Perubahan Struktural dan Perubahan Proses

Selain bentuk-bentuk yang telah disebutkan di atas, perubahan sosial dapat pula dibedakan atas dua bentuk, yakni perubahan Struktural dan perubahan proses.

- Perubahan Struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Contohnya, penggunaan alat-alat pertanian yang serba canggih.
- Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contohnya, perubahan kurikulum dalam bidang pendidikan yang sifatnya menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam perangkat atau dalam pelaksanaan kurikulum sebelumnya.

7. Tinjauan Tentang Dampak Transformasi Spasial di Wilayah Peri Urban

Istilah dampak merupakan bentuk alih bahasa dari kata bahasa Inggris *Impact*. Namun demikian, pemakaian kata ini perlu diberlakukan secara hati-hati karena sangat rawan akan terjadinya multitafsir karena memberikan keluasan makna. Suratmo (1988) dalam bukunya mengenai *Analisis Dampak Lingkungan* memberikan pengertian dampak sebagai setiap perubahan yang terjadi didalam lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan manusia. Oleh karena akibat dapat muncul secara simultan dengan proses kegiatan manusia itu sendiri maupun suatu

akibat yang muncul setelah proses kegiatan itu berakhir. Dengan demikian dampak dapat dimaknakan sebagai akibat yang menyertai maupun akibat yang datang kemudian dari suatu kegiatan manusia.

Transpormasi spasial merupakan artikulasi dari kegiatan manusia yang ada dipermukaan bumi. Beberapa dampak dari perubahan transpormasi spasial terhadap lingkungan WPU adalah sebagai berikut:

a. Dampak Terhadap Bentuk Pemanfaatan Lahan.

Transpormasi spasial di WPU sendiri tidak lain merupakan salah satu bentuk urbanisasi (proses berubahnya atribut kedesaan menjadi bersifat kekotaan). Dalam kaitannya dengan bentuk pemanfaatan lahan, transpormasi spasial yang terlihat adalah proses berubahnya bentuk pemanfaatan lahan yang berorientasi kepentingan kekotaan. Beberapa bentuk pemanfaatan lahan yang perlu mendapat sorotan utama adalah bentuk pemanfaatan lahan pertanian, bentuk pemanfaatan lahan permukiman dan bentuk pemanfaatan lahan non permukiman bukan pertanian, khususnya bentuk pemanfaatan lahan jasa dan industri.

Khusus mengenai bentuk pemanfaatan lahan pertanian di WPU menjadi suatu permasalahan yang krusial untuk mendapat perlakuan yang bijaksana, karena menyangkut peri kehidupan kekotaan di satu sisi dan perikehidupan kedesaan di sisi yang lain. Namun begitu, setiap bentuk perubahan pemanfaatan lahan pada suatu bidang tertentu akan mempengaruhi bidang lahan di dekatnya. Gejala ini menurut Friedman (1973) disebut sebagai gejala keloktif, oleh Bryant et.al (1982) disebut sebagai gejala eksternalitas atau gejala luberan dan menurut McGee (1977). Khusus

mengenai keberadaan lahan pertanian di WPU, efek lintas batas yang muncul dapat berupa gangguan terhadap system irigasi, terganggunya pengolahan lahan, penanaman, pertumbuhan tanaman, produksi dan produktivitas. Munculnya gangguan tersebut dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung dan kebanyakan mempunyai dampak yang merugikan terhadap keberlangsungan usaha tani yang masih dipertahankan.

Beberapa pengalaman menyebutkan bahwa hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya erosi komitmen petani terhadap kegiatan pertanian maupun lahan pertaniannya (Yunus, 2001). Transpormasi spasial terkait dengan pemanfaatan palahan pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Hilangnya lahan pertanian,
- 2) Gejala komersialisasi dan intensifikasi pertanian
- 3) Produksi dan produktivitas

Dampak transpormasi spasial terhadap lahan permukiman dapat diamati dlaam empat hal yakni:

- 1) Pertambahan luas lahan permukiman
- 2) Pemadatan bangunan rumah mukim
- 3) Kecenderungan segresi rumah mukim
- 4) Merebaknya permukiman liar.

Gejala-gejala yang disebutkan diatas tersebut erat kaitannya dengan gejala pertambahan jumlah penduduk di WPU. Seperti diketahui bahwa bagian WPU, khususnya yang terletak dekat dengan lahan kekotaan terbangun merpuakan sasaran

pendatang-pendatang baru untuk bertempat tinggal, baik pendatang dari bagian dalam kota maupun pendatang dari bagian yang lebih jauh dari itu. Bagi migrant yang berasal dari bagian dalam kota, WPU merupakan daerah yang sangat menarik untuk bertempat tinggal, karena menawarkan tingkat kenyamanan yang jauh lebih tinggi ketimbang suasana di bagian dalam kota.

Beberapa faktor penarik WPU bagi migran dari bagian dalam kota yang dapat dikemukakan antara lain keinginan memperoleh *privacy* yang terjamin, keinginan untuk menikmati suasana alami dan kebebasan membangun, keinginan untuk menikmati keluasaan melaksanakan kegiatan, keinginan untuk memperoleh suasana yang kondusif untuk membesarkan anak-anak, keinginan untuk memperoleh harapan baru berkegiatan ekonomi.

Sementara itu, beberapa faktor penarik WPU bagi migran dari luar kota sangat terkait dengan atribut kekotaan dan beberapa diantaranya dapat disebutkan adalah:

- 1) Keinginan untuk memperoleh lokasi tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja
- 2) Keinginan untuk memperoleh peluang kerja yang lebih besar
- 3) Keinginan untuk menikmati fasilitas kehidupan dan kegiatan yang lebih lengkap
- 4) Keinginan untuk memperoleh lokasi tempat tinggal yang mempunyai aksesibilitas yang tinggi
- 5) Keinginan untuk memperoleh lokasi yang lebih prestisius/lebih bermartabat.

b. Dampak Terhadap Harga Lahan

WPU merupakan daerah yang menarik bagi penduduk maupun fungsi-fungsi untuk bertempat tinggal maupun untuk menjadikannya sebagai lokasi kegiatannya. Dampak langsung yang dapat diamati adalah bertambahnya lahan permukiman maupun lahan untuk non permukiman. Dipihak lain lahan belum terbangun yang tersedia menjadi semakin sempit. Makin mendekati lahan kekotaan terbangun makin intensif terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Disinilah mulai terlihat gejala ketidakseimbangan antar permintaan akan lahan dan ketersediaan lahan. Oleh karena semakin lama ketersediaan lahan belum terbangun makin berkurang dan permintaan akan lahan makin meningkat, maka kesenjangan antara permintaan akan lahan dan ketersediaan lahan akan semakin bertambah lebar. Hal inilah yang berakibat sangat signifikan terhadap harga lahan di WPU.

Dalam wacana mengenai harga lahan ada dua hal penting yang perlu mendapat sorotan yaitu yang pertama berkenaan dengan nilai pasaran dan yang kedua berkenaan dengan nilai kegunaan, dimana di WPU akan terjadi determinan harga lahan.

c. Dampak Terhadap Lingkungan

Gejala – gejala yang muncul akibat dari terjadinya transpormasi spasial terhadap lingkungan antara lain terkait dengan lingkungan abiotik, biotik dan sosio kultural.

- 1) Dampak terhadap lingkungan abiotik

Dampak abiotik yang akan disoroti sebagai akibat dari terjadinya transpormasi sosial adalah gejala timbulnya degradasi kualitas lingkungan. Hal-hal yang mengemuka dalam hal ini; penurunan kualitas lingkungan abiotik di WPU yaitu:

- Terjadinya penurunan kualitas lingkungan abiotik yang diakibatkan oleh peningkatan polusi udara;
 - Penurunan kualitas lingkungan abiotik yang diakibatkan oleh polusi tanah;
 - Penurunan kualitas lingkungan abiotik yang diakibatkan oleh polusi air;
 - Penurunan kualitas lingkungan abiotik yang diakibatkan oleh kerusakan lahan;
- Keempatnya merupakan dampak yang muncul oleh karena kegiatan manusia yang semakin intensif dan tidak terarah yang tercermin dalam wacana transpormasi spasial.

2) Dampak terhadap lingkungan biotik

Suatu wilayah sebenarnya merupakan suatu sistem dalam artian bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari suatu wilayah yang lebih besar dan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan wilayah lain. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap perubahan elemen lingkungan yang lain baik yang berada di elemen wilayah yang bersangkutan maupun di wilayah lain. Transpormasi spasial yang ada di WPU merupakan suatu bentuk perubahan elemen lingkungan WPU itu sendiri, sehingga elemen – elemen lingkungan yang ada di WPU juga ikut berubah. Disamping elemen – elemen lingkungan yang ada di WPU juga dapat terpengaruh

karena adanya gangguan yang ditimbulkan oleh sebab yang datang dari daerah lain.

3) Dampak terhadap lingkungan sosio kultural

Ada tujuh gejala yang muncul sebagai akibat dari transpormasi spasial terhadap lingkungan sosio kultural yaitu:

- Penurunan kualitas lingkungan permukiman

Gejala khusus yang muncul dari dari penurunan kualitas lingkungan hidup ini adalah gejala munculnya permukiman kumuh, lebih khusus lagi adalah munculnya permukiman kumuh yang diakibatkan oleh proses densifikasi bangunan rumah mukim yang tidak terkendali.

- Gejala dekohesivitas sosial

Gejala dari munculnya dekohesivitas sosial adalah terjadinya perubahan sosial dari sifat kedesaan menjadi sifat kekotaan yang dicerminkan dalam perubahan masyarakat paguyuban menjadi patembayan. Masuknya pendatang baru secara individual dan masuknya kompleks perumahan kedaerah kedesaan akan merubah pranata sosial. Hal ini disebabkan karena pranata sosial yang sudah lama dilaksanakan secara turun temurun oleh seluruh anggota masyarakat sedikit demi sedikit akan mengalami pergeseran karena beberapa pendatang baru tidak mengikutinya.

- Gejala pendesakan petani
- Diversifikasi mata pencaharian

- Alih mata pencaharian
- Penurunan jumlah petani
- Gaya hidup.

8. Perkembangan Perkotaan dalam Aspek Ekonomi Masyarakat

a. Karakteristik Ekonomi Masyarakat Perkotaan

Masyarakat di perkotaan umumnya telah memiliki konsep perkonomian yang baik dan memadai. Hal ini terwujud karena di perkotaan telah memiliki fasilitas, serta sarana dan prasarana yang mendukung proses berjalannya suatu aktivitas perekonomian masyarakat perkotaan. Kestabilan ekonomi di daerah perkotaan sangat di pengaruhi oleh kreatifitas masyarakatnya, utamanya adalah pemerintah yang berperan dalam memberikan kebijakan, serta masyarakat sebagai pelaku sektor ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, masyarakat kota telah terbagi kedalam berbagai profesi, heterogen yakni di mulai dari pemerintah, pegawai negeri, pegawai swasta, buruh, petani serta para pekerja di bidang tertentu lainnya. Di kota di kenal berbagai instansi serta sarana umum yang berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota, yakni seperti perbankan, koperasi, pegadaian pasar, mall, dan lain-lain. Berdasarkan uraian tersebut, maka asebenarnya kota telah memilki kesejahteraan ekonomi yang baik walaupun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang tinggal di kota dan tergolong miskin. Namun jika dirata-ratakan secara umum, maka kota telah berhasil membangun fasilitas ekonommi dengan baik (Anwar. 2002).

b. Mata Pencaharian

Mata pencaharian sendiri dapat didefinisikan sebagai pekerjaan pokok yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu penjelasan mengenai mata pencaharian, yaitu;

The term livelihood attempts to capture not just what people do in order to make a living, but the resources that provide them with the capability to build a satisfactory living, the risk factors that they must consider in managing their resources, and the institutional and policy context that either helps or hinders them in their pursuit of a viable or improving living (Frank Ellis, 2004).

Maksud dalam istilah mata pencaharian tersebut adalah tidak hanya apa yang dilakukan manusia untuk hidup, tetapi juga sumber daya yang menyediakan mereka dengan kapabilitas untuk membangun kehidupan yang memuaskan, faktor yang beresiko adalah mereka harus memperhatikan dalam mengurus sumber daya, dan lembaga serta hubungan politik yang juga membantu dan menghalangi dalam tujuan mereka agar dapat hidup dan meningkatkan taraf hidup. Merujuk dari definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi mata pencaharian itu sendiri yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini. Mata pencaharian adalah pekerjaan pokok yang dilakukan manusia untuk hidup dan sumber daya yang tersedia untuk membangun kehidupan yang memuaskan (peningkatan taraf hidup), dengan memperhatikan faktor seperti mengawasi penggunaan sumber daya, lembaga dan hubungan politik. Dalam perkembangannya, mata pencaharian seseorang seringkali berubah baik karena faktor internal, eksternal, ataupun kombinasi dari keduanya (Wahyu, 2007).

Adapun dalam penelitian ini berdasarkan lokasi penelitian di perkotaan menurut Mubyarto (1993) dalam (<http://andabackband.blogspot.co.id/2013/01/>) mata pencaharian masyarakat perkotaan terdiri atas beberapa jenis pekerjaan meliputi:

- Petani atau Nelayan
- Buruh Tani
- Buruh Industri
- Usaha industri / penjual
- Pedagang / penjual
- Profesional
- Pekerjaan jasa

c. Tingkat Pendapatan

Ada tiga klasifikasi pendapatan menurut Sukirno (2006) yaitu:

- Pendapatan Pribadi, Semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara.
- Pendapatan Disposibel, Pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.
- Pendapatan Nasional, Nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun.

Pendapatan masyarakat sangat tergantung dari lapangan usaha, pangkat dan jabatan pekerjaan, tingkat pendidikan umum, produktivitas, prospek usaha, permodalan dan lain – lain. Faktor – faktor tersebut menjadi penyebab perbedaan tingkat pendapatan masyarakat. Di dalam perekonomian ada dua faktor yang menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan, salah satunya yaitu efek pendapatan.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengaruh perubahan fungsi ruang terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat telah banyak dilakukan. Peneliti-peneliti sebelumnya lebih banyak menekankan pada salah satu perubahan fungsi ruang tidak melihat perubahan fungsi ruang secara keseluruhan. Misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh Linda Dwi Rohmadiani (2011) tentang *Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani*.

Hal penting yang dikemukakan Linda pada penelitiannya adalah bagaimana perubahan fungsi ruang yang ada telah mengubah struktur mata pencaharian rumah tangga petani dari sector pertanian (primer) ke sektor sekunder dan tersier (buruh, Pengrajin, PNS/TNI/POLRI dan pedagang). Pada penelitian ini hanya lebih menekankan pada dampak yang terjadi pada kehidupan ekonomi petani tidak pada masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agung Jauhari (2011) tentang *Dampak Pembangunan Perumahan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kondisi Sosial Ekonomi Penjual Lahan di Kecamatan Mlati*. Temuan penting dalam penelitian ini menekankan pada aspek ekonomi penjual lahan dimana dinyatakan bahwa perubahan penggunaan lahan tidak memberikan dampak yang negative dalam kehidupan ekonomi penjual lahan yang diakibatkan karena pekerjaan utama dari penjual lahan tidak berkaitan langsung dengan pengolahan lahan. Penelitian ini juga hanya berfokus pada satu subyek penelitian yakni para penjual lahan tidak melihat masyarakat secara keseluruhan.

Ar Rohma Taufiq Hidayat Pada tahun 2011 meneliti tentang *pengaruh keberadaan kampung inggris terhadap guna lahan dan sosial ekonomi masyarakat desa di Tulung Rejo dan Desa Palem*. Pada penelitian ini disebutkan bahwa keberadaan aktifitas baru yakni kampung inggris mempengaruhi perkembangan guna lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dimana lebih berkembang ke arah positif.

Beberapa hal yang dikemukakan Nela Anustin dalam penelitiannya tentang *Analisis Transformasi wilayah Peri Urban pada aspek fisik dan sosial ekonomi (Kecamatan Kertasura)* bahwa transformasi spasial dari wilayah kedesaan menjadi wilayah kota ditandai dengan adanya pergeseran sektor pertanian ke sektor non pertanian yang ditunjukkan pada perubahan lahan dan mata pencaharian yang berakibat pada penurunan hasil pertanian, adanya peningkatan kualitas dan kuantitas aksesibilitas dan utilitas umum, transformasi perilaku sosial ekonomi terjadi dengan

pergeseran ke sifat kekotaan dimana ditemui penurunan kegiatan sosial kemasyarakatan dan peningkatan perilaku ekonomi perkotaan.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Erlis Saputra tentang *Perubahan Spasial Dan Tendensi Perkembangan Fisik Kota Pekanbaru Tahun 1990-2006*. Penelitian ini mengemukakan beberapa hal yakni Luas tutupan lahan yang mengalami perubahan ternyata lebih besar daripada luas penggunaan lahan yang mengalami perubahan. Ketersediaan fasilitas umum ternyata merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan spasial Kota Pekanbaru. Perubahan spasial kota pekanbaru ternyata berdampak pada penurunan luas lahan pertanian, penurunan jumlah produksi pertanian, penurunan penghasilan penduduk dari sektor pertanian, peningkatan penghasilan penduduk dari sektor non pertanian, dan peningkatan struktur mata pencaharian penduduk pada sektor perdagangan dan jasa.

C. Kerangka Pikir

Terdapat dua kekuatan dinamis yang saling berlawanan yang menyebabkan kota dan pola penggunaan lahannya berubah dari waktu ke waktu, yaitu kekuatan sentripetal dan sentrifugal. Kekuatan sentripetal adalah kekuatan yang mengakibatkan gerakan penduduk dan fungsi-fungsi dari luar kota menuju ke dalam kota dan dapat mengakibatkan terbentuknya serta berubahnya pola penggunaan lahan suatu kota. Hal ini dikarenakan adanya daya tarik daerah tujuan dan daya dorong daerah asal. Kekuatan sentrifugal adalah kekuatan yang mengakibatkan

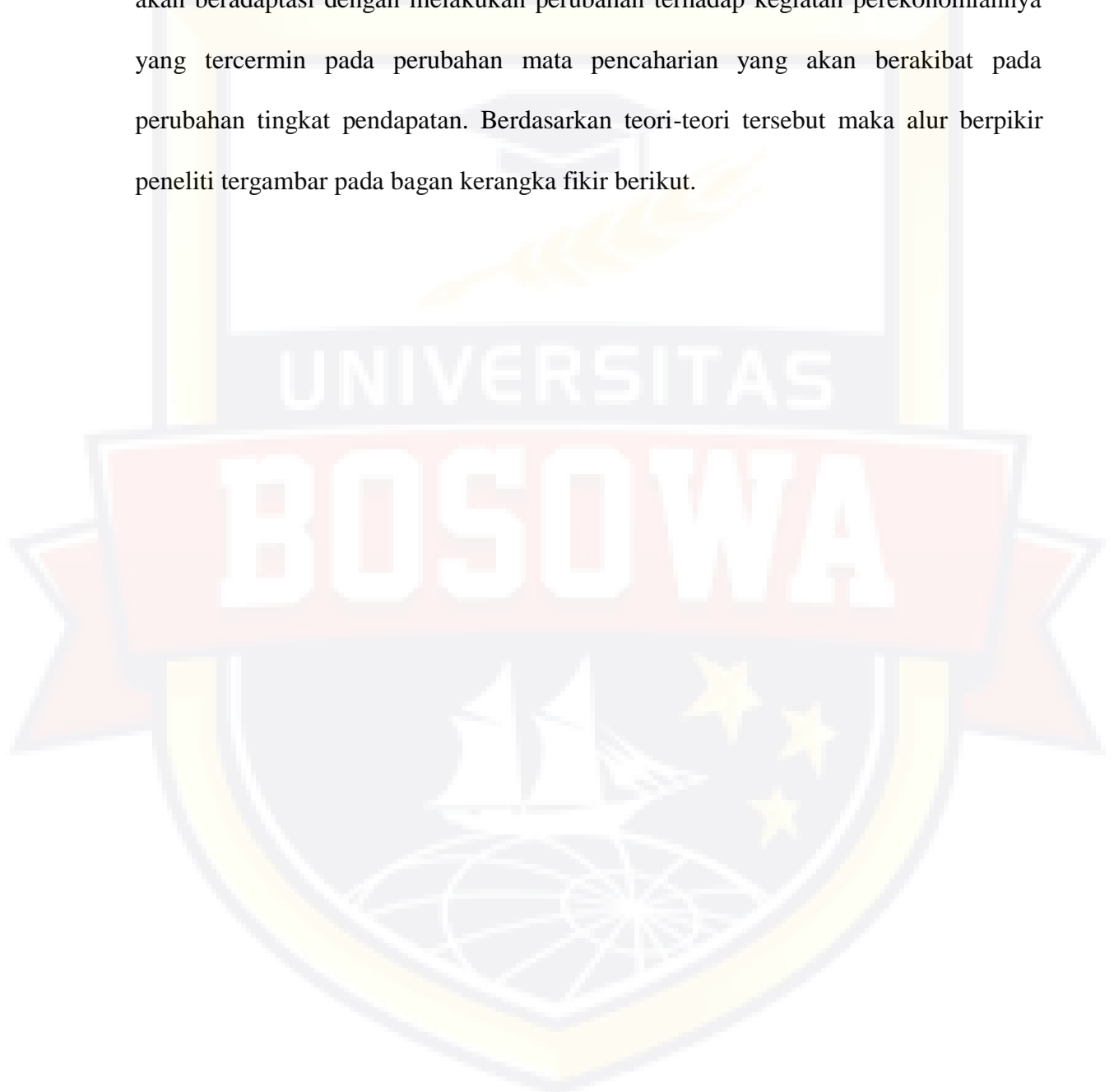
gerakan penduduk dan fungsi-fungsi dari dalam kota menuju ke luar kota dan dapat mengakibatkan perubahan pola penggunaan lahan suatu kota.

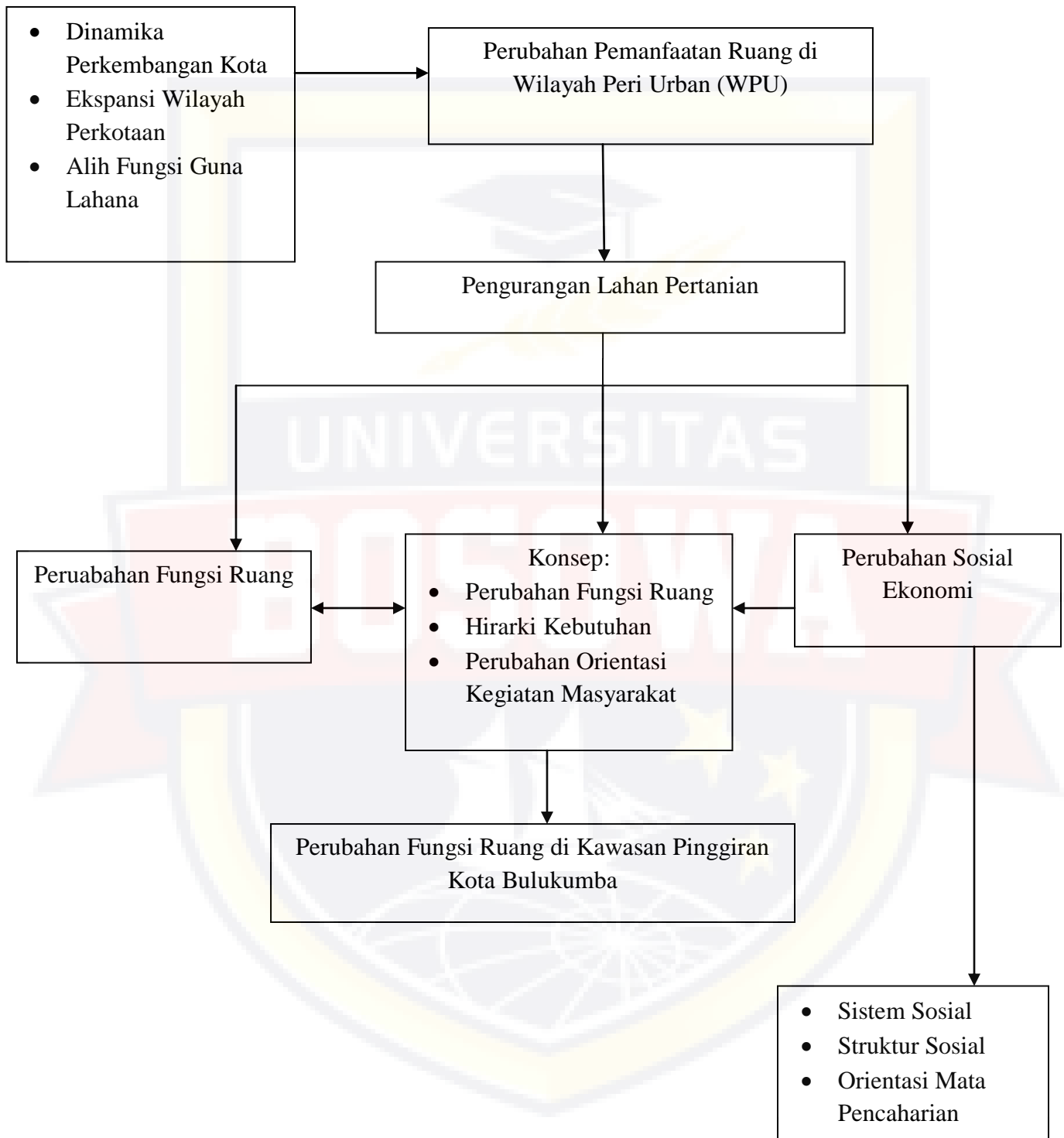
Perkembangan wilayah Kota Bulukumba lebih mengarah kepada perkembangan secara sentrifugal yakni perkembangan kota ke arah luar dimana mengambil wilayah sebelumnya adalah pinggiran kota. Hal yang paling berpengaruh dalam perkembangan kota Bulukumba adalah faktor tekanan jumlah penduduk, dan keterbatasan lahan perkotaan.

Abraham Maslow (Robbins, 2008) mengemukakan bahwa terdapat lima kebutuhan dasar manusia yakni fisiologi, rasa aman, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Sementara itu John Turner (Yunus 2008) mengemukakan teori tentang mobilitas tempat tinggal (*Residential Mobility Theory*) yang membagi tiga kelompok penduduk atas dasar lamanya bertempat tinggal di kota menjadi 3 kelompok yaitu kelompok perintisan, kelompok pemantapan dan kelompok pencari status. Kelompok penduduk pemantapan yang disebutkan oleh John Turner akan beralih ke wilayah peri urban yang menyebabkan mereka berganti kelompok menjadi kelompok pencari status. Peralihan kelompok ini akan menyebabkan terjadinya perubahan kondisi pada penduduk asli wilayah peri urban sehingga mereka lambat laun akan merubah kondisi sosial dan ekonomi mereka agar mereka bisa bertahan di wilayah tersebut.

Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat tersebut ditandai dengan perubahan struktur sosial yang ada, interaksi antar masyarakatnya dan perubahan kemampuan yang dimiliki yang terwakilkan dalam perubahan tingkat

pendidikan mereka. Selain dengan perubahan-perubahan sosial masyarakat pinggiran akan beradaptasi dengan melakukan perubahan terhadap kegiatan perekonomiannya yang tercermin pada perubahan mata pencaharian yang akan berakibat pada perubahan tingkat pendapatan. Berdasarkan teori-teori tersebut maka alur berpikir peneliti tergambar pada bagan kerangka fikir berikut.





Gambar 3.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

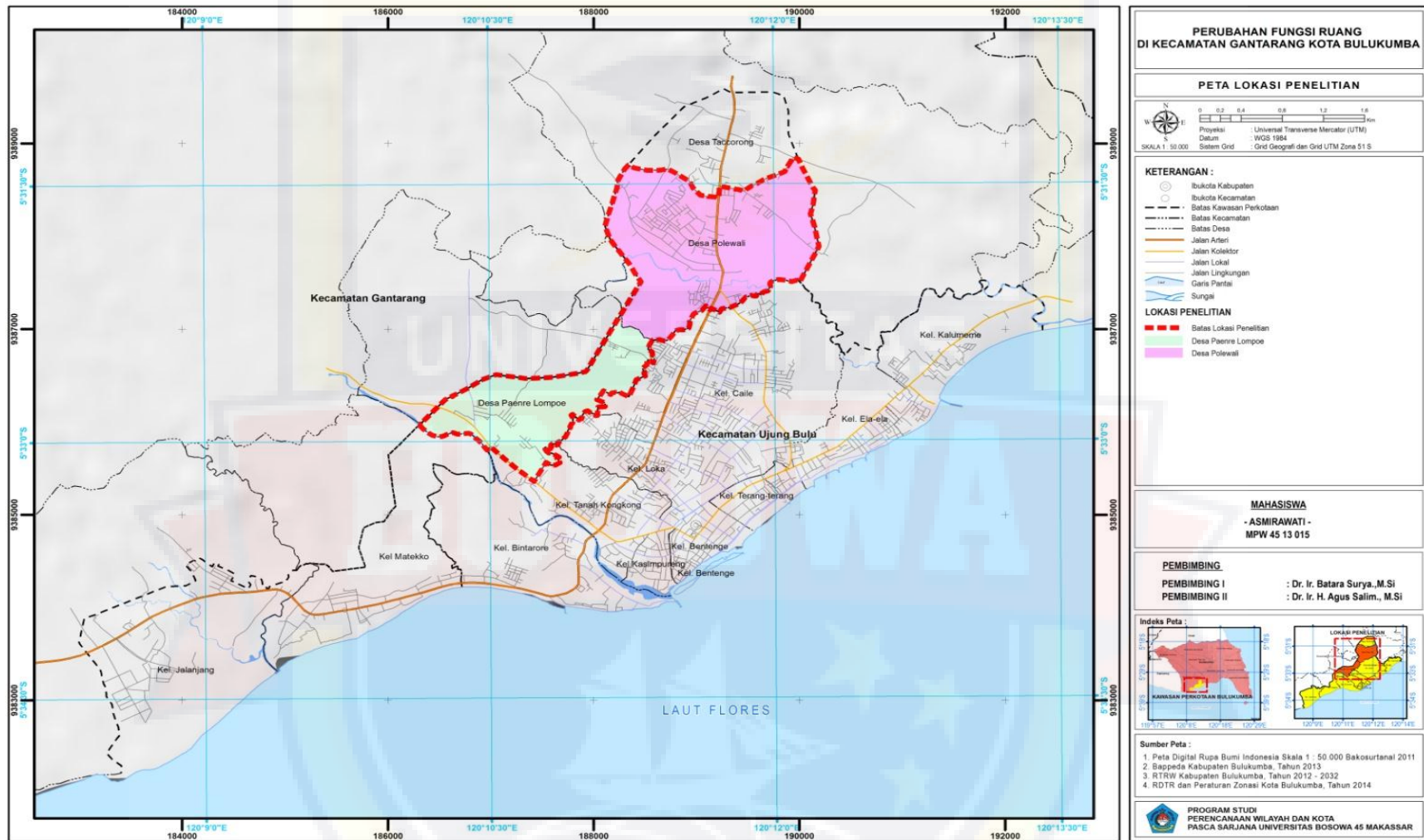
METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian kuantitatif sebagai metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap sebuah fenomena. Penelitian ini difokuskan untuk meneliti perubahan fungsi ruang sebagai determinan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Variabel penelitian ini berangkat dari teori perkembangan kota dan perkembangan fungsi dalam hal perubahan struktur dan pola ruang serta teori hirarki kebutuhan manusia dalam kehidupannya yang mendorong terjadinya perubahan kondisi sosial dan ekonomi, Variabel tersebut kemudian digunakan dalam proses pencarian data sebagai input dalam proses analisis yang masing-masing telah ditentukan teknik analisisnya. Berdasarkan kajian literatur, maka pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dimana pengkajian berdasarkan variabel berdasarkan variabel mandiri. Adapun data yang digunakan terdiri dari data kuantitatif yang berasal dari penyebaran kuesioner yang kemudian dideskriptifkan berdasarkan dari hasil telaah dokumen serta observasi lokasi penelitian.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah kawasan pinggiran Kota Bulukumba yang terdapat di Kecamatan Gantarang Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali. Alasan peneliti memilih lokasi ini, karena pada kedua desa ini terjadi konsentrasi pengembangan wilayah administrasi baru Kota Bulukumba yang menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan ruang yang diduga memunculkan dampak terhadap kondisi sosial masyarakat setempat.
2. Waktu penelitian dengan judul Perubahan Fungsi Ruang Kawasan Pinggiran Kota Bulukumba dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.



Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah objek masyarakat yang mendiami wilayah tersebut dalam hal ini masyarakat wialayah Kecamatan Gantarang Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali dengan jumlah populasi sebesar 10.221 Jiwa.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan metode *proportional random sampling*. *Proportional random sampling* adalah teknik sampling yang memperhatikan proporsi/perimbangan sub populasi, dengan menggunakan teknik ini diperoleh *proportional* sampel. Jadi dengan menggunakan *proportional random sampling*, maka proporsi atau perimbangan besarnya sampel yang akan diambil dari masing-masing sub populasi dapat ditentukan, yaitu sebesar 10% dari jumlah individu untuk tiap-tiap sub populasi.

Penetapan sampel dilakukan berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan hasil observasi awal yang ada pada lokasi penelitian. Karena ukuran sampel telah diketahui maka Rumus Taro Yamane adalah rumus yang digunakan dalam penelitian ini, dengan persamaan: $n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$ (Sumber: Rakhmat dalam Riduan 2013).

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d = Derajat Kecermatan (level of significance), dalam studi ini nilai derajat kecermatan yang diambil adalah sebesar 10% sehingga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan studi sebesar 90%.

Jumlah sampel dapat dilihat sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk di Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali adalah 10.221 jiwa (sumber: Profil desa, 2016)
2. Sampel pada lokasi penelitian, dengan menggunakan persamaan,

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2} \text{ maka,}$$

$$n = \frac{10.221}{1 + 10.221 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{10.221}{1 + 10.221 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{10.221}{103,21}$$

$$n = 99,03 \text{ digenapkan jadi } 100$$

Dari jumlah total responden dibagi menjadi dua yaitu 70% untuk penduduk lokal dan 30% untuk penduduk pendatang.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data karakteristik wilayah
- b. Data kependudukan yang meliputi: jumlah penduduk, jenis kelamin, status dalam keluarga, usia responden, pendidikan (tahun sukses), jenis

pekerjaan, status atau strata dalam masyarakat, jenis organisasi masyarakat yang diikuti, interaksi kekerabatan antar masyarakat setempat, dan tingkat pendapatan

2. Sumber Data

Data – data dalam penelitian ini didapatkan dari dua sumber yakni data primer melalui survey dan observasi langsung di lokasi penelitian dan data sekunder yang bersumber dari instansi terkait seperti Kantor Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya dan kantor Badan Pusat statistik Kabupaten Bulukumba. Adapun kebutuhan data dan sumbernya digambarkan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.1.
Kebutuhan Data Penelitian

Data Primer	Data Sekunder	Sumber Data
Karakteristik Responden <ul style="list-style-type: none"> – Jenis Kelamin – Status dalam Keluarga – Usia Responden – Pendidikan (Tahun Sukses) – Jenis Pekerjaan 	Karakteristik Fisik Daerah Penelitian	Survey Lapangan
Perubahan Penggunaan Lahan dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat <ul style="list-style-type: none"> – Status atau strata dalam masyarakat – Jenis organisasi masyarakat yang diikuti – Interaksi kekerabatan antar masyarakat setempat – Tingkat pendapatan 	Karakteristik Demografis <p>Jumlah, Kepadatan, dan Komposisi Penduduk</p>	Survey Lapangan dan Kantor BPS
	Dokumen Perencanaan dan Pemetaan <p>Peta Penggunaan Lahan tahun 2006, 2010, dan 2015</p>	Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya <p>Observasi Lapangan</p>

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data adalah salah satu bagian kegiatan yang sangat penting, jika teknik dalam pengambilan data menggunakan cara yang kurang tepat maka data yang di peroleh pun akan kurang akurat dan kemudian akan berpengaruh pada proses analisis dan hasil penelitian. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **Observasi atau pengamatan** ke lokasi penelitian dengan menggunakan cheklis guna mendapatkan gambaran dari kondisi yang ingin diteliti.
- **Teknik Survey dengan menggunakan kuesioner** yaitu sejumlah pertanyaan sesuai dengan data yang dibutuhkan terkait dengan variabel yang digunakan.
- **Dokumentasi**, yaitu dengan mempelajari dokumen yang berasal dari dinas/ instansi maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan maksud dari penelitian ini. Studi dokumentasi berkaitan dengan kebutuhan data yang tertulis dan sudah disajikan oleh pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemerintah maupun swasta.

F. Variabel Penelitian

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pengaruh dan varibel terpengaruh

1. Variabel pengaruh (*Independent Variabels*)

Variabel pengaruh dalam penelitian ini adalah pemanfaatan ruang dengan indikator fungsi ruang dan alih fungsi lahan.

2. Variabel terpengaruh (*Dependent Variabels*)

Variabel terpengaruh dalam penelitian ini adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan indikator kondisi sosial adalah sistem sosial dan struktur dan pranata sosial. Sementara untuk variabel kondisi ekonomi memiliki indikator mata pencaharian, tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran tentang variabel pengaruh dan terpengaruh dalam penelitian ini digambarkan dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2.
Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
1. Pemanfaatan Ruang (Pengaruh)	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi Ruang • Alih Fungsi Lahan
Kondisi Sosial (Terpengaruh)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Sosial • Struktur Sosial
2. Pemanfaatan Ruang (Pengaruh)	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi Ruang • Alih Fungsi Lahan
Kondisi Ekonomi (Terpengaruh)	<ul style="list-style-type: none"> • Mata Pencaharian • Tingkat Pendapatan • Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Analisis 2015

G. Analisis Data

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, maka metode analisis yang akan digunakan yaitu:

1. Analisis Super Impose

Salah satu metoda analisis keruangan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah proses tumpang tindih atau overlay antara dua atau lebih layer tematik

untuk mendapatkan tematik kombinasi baru sesuai dengan persamaan yang dipergunakan. Dalam penelitian ini, metode tumpang tindih dilakukan dalam melakukan pengolahan data untuk memperoleh perubahan pemanfaatan ruang pada di Kecamatan Gantarang Desa Polewali dan Desa Paenre Lompoe dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2. Analisis Statistik-Kuantitatif

Data yang terjaring melalui hasil observasi di lokasi penelitian, diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif-kuantitatif dengan menggunakan pendekatan tabulasi silang (*Crosstabulation*). Data yang terkumpul dilakukan kategorisasi dengan skala likert, yaitu sangat berpengaruh, berpengaruh, kurang berpengaruh, tidak berpengaruh dan sangat tidak berpengaruh. Penentuan kategorisasi didasarkan pada skala likert dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.
Penentuan bobot dengan skala likert

No	Skala Likert	Persentase (%)	Nilai Bobot
1	Sangat Berpengaruh	88,87 – 100	5
2	Berpengaruh	66,67 – 88,88	4
3	Kurang Berpengaruh	44,45 – 66,66	3
4.	Tidak Berpengaruh	22,23-44,44	2
5.	Sangat Tidak Berpengaruh	0,00-22,22	1

Metode analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama yakni bagaimana fungsi ruang bekerja sebagai determinan perubahan kondisi

sosial masyarakat. Hasil yang telah diperoleh pada tahap I didistribusikan ke dalam tabel silang (*crosstab*) yang menggambarkan penyebaran data. Selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan arah dan tujuan pengembangan analisis.

3. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yakni untuk mengukur dampak yang timbul sebagai akibat dari perubahan fungsi ruang. Analisis ini dilakukan membandingkan setiap fenomena yang ada dengan informasi pada tahun yang berbeda. Dalam penelitian ini analisis ini dilakukan untuk membandingkan tingkat perekonomian masyarakat sebelum dan sesudah terjadinya perubahan fungsi ruang.

H. Definisi Operasional

1. Fungsi Ruang

Fungsi ruang dalam penelitian ini diartikan sebagai peruntukan ruang kawasan penelitian yang dalam hal ini merupakan fungsi budidaya yakni fungsi perdagangan dan permukiman.

2. Perubahan Fungsi Ruang

Perubahan Fungsi ruang dapat didefinisikan sebagai Perubahan bentuk, orientasi, dan metode penggunaan lahan/ruang yang akan mengakibatkan hasil dari penggunaan lahan ini juga berubah.

3. Sistem Sosial

Sistem sosial dalam penelitian ini diartikan sebagai hubungan antara anggota masyarakat seperti interaksi sosial antar masyarakat setempat.

4. Struktur dan Pranata Sosial

Struktur dan pranata sosial dalam penelitian ini diartikan sebagai susunan atau kelompok masyarakat yang terbentuk sebagai akibat dari adanya interaksi antar masyarakat.

5. Mata Pencaharian

Mata pencaharian diartikan sebagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Polewali dan Desa Paenrelompoe untuk mencari nafkah

6. Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi

Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi dapat didefinisikan sebagai perubahan pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait dengan strata masyarakat, interaksi sosial, mata pencaharian dan tingkat pendapatan.

7. Masyarakat Setempat

Masyarakat setempat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai masyarakat yang mendiami atau bertempat tinggal di Kecamatan Gantarang Desa Polewali dan Desa Paenrelompoe.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba

1. Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi daerah merupakan hal yang penting dalam mendukung secara fisik dalam pengembangan suatu daerah. Faktor fisik memberikan penilaian tentang kemampuan lahan dan kesesuaian lahan yang dijadikan lokasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, maupun penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

a. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Bulukumba secara geografis terletak di antara $05^{\circ}20'$ - $05^{\circ}40'$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ}58'$ - $120^{\circ}28'$ Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Bone dan
Kepulauan Selayar

Secara administratif Kabupaten Bulukumba berada dalam daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terbagi dalam 10 kecamatan yang meliputi 136 desa/kelurahan terdiri dari 27 kelurahan dan 109 desa. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba

meliputi; darat seluas 1.154,67 km² dan laut. Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki kewenangan sejauh 4 mil laut dari garis pantai ke arah laut = 237,67 km², dengan panjang garis pantai = 128 km yang berada pada 7 kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Herlang, dan Kecamatan Kajang.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Bulukumba

Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/ Kelurahan
Gantarang	173,51	15,03	21
Ujungbulu	14,44	1,25	9
Ujung Loe	144,31	12,50	13
Bontobahari	108,60	9,40	8
Bontotiro	78,34	6,78	13
Herlang	68,79	5,96	8
Kajang	129,06	11,18	19
Bulukumpa	171,33	14,84	17
Rilau Ale	117,53	10,18	15
Kindang	148,76	12,88	13
Jumlah	1.154,67	100,00	136

Sumber: Bulukumba Dalam Angka Tahun 2016

b. Penggunaan Lahan

Pola tata guna lahan pada dasarnya adalah merupakan gambaran ruang dari hasil kegiatan manusia, tingkat teknologi dan keadaan fisik daerah. Pola tata guna lahan pada suatu daerah merupakan cermin kegiatan manusia yang bermukim di daerah tersebut dalam mengusahakan dan memanfaatkan lahan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah guna memenuhi kebutuhan hidup. Wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki luas 1.154,67 km², berdasarkan peta penggunaan lahan hasil interpretasi citra satelit, peta penggunaan lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulukumba.

Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Bulukumba sebagian besar didominasi oleh lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk konservasi lahan di daerah ini masih terdapat beberapa lokasi kawasan hutan yang tersebar di 6 kecamatan dengan luas keseluruhan 8.453,25 hektar. Akan tetapi di kecamatan tersebut masih terdapat beberapa lahan kritis yang sebagian besar terdapat di 2 kecamatan yaitu Bontobahari dan Kindang.

Tata guna lahan setiap tahun selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam memenuhi kegiatan perekonomian atau pembangunan sarana fisik oleh Pemerintah Daerah. Kecenderungan yang terjadi dan harus mendapatkan perhatian adalah perubahan tata guna lahan pertanian yang berubah menjadi lahan non pertanian serta perubahan lahan hutan menjadi lahan pertanian, permukiman atau aktifitas yang lain yang dapat mengganggu eksistensi hutan. Tata guna lahan untuk pertanian adalah, pemanfaatan lahan untuk aktifitas pertanian, seperti sawah, ladang, tegalan, kebun, hutan dan tambak, sedangkan tata guna lahan untuk non pertanian dapat berupa permukiman, industri, kantor, pusat perbelanjaan dan lain-lain.

Tiga kecamatan yang mengalami perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi non pertanian antara lain terdapat di wilayah Kecamatan Bulukumpa, Kajang, dan Kindang. Kegiatan lain yang diperoleh adalah adanya pertambangan tanah liat di lahan persawahan, sebagai bahan baku bata merah, seperti di wilayah Kecamatan Ujungloe. Dari sub sektor pertanian, pertambangan tanah liat tersebut dapat merugikan, karena mengurangi luas lahan produksi dan menyisakan tanah dengan kualitas kesuburan tanah yang lebih rendah.

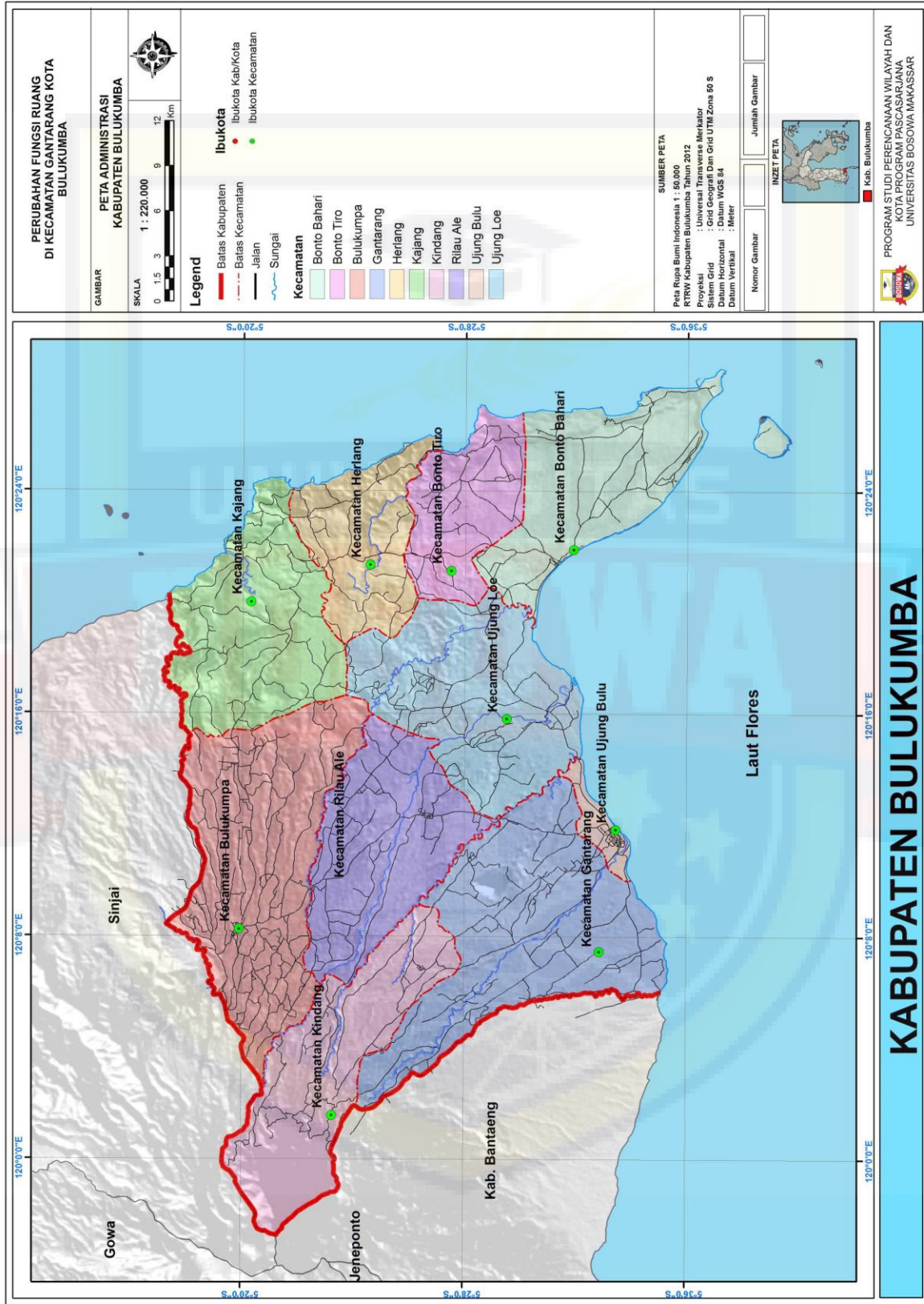
Penurunan luas lahan pertanian jelas akan memperbesar angka kepadatan penduduk agraris di Kabupaten Bulukumba. Kepadatan penduduk agraris yang semakin besar menggambarkan semakin besarnya jumlah penduduk yang harus ditanggung kehidupannya oleh setiap luas lahan pertanian. Informasi lain yang diperoleh pada saat inventarisasi data lapangan, adalah adanya perubahan tata guna lahan yang lain yang juga dapat mempunyai dampak buruk karena adanya aktivitas pembukaan hutan sebagai ladang berpindah, jenis tanaman semusim atau untuk pertanian tanaman perkebunan. Dampak dari perubahan fungsi hutan, saat ini telah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kejadian longsor dan banjir yang terjadi di bagian hilir sungai dan dataran rendah di Kabupaten Bulukumba.

Pada intinya bahwa, wilayah Kabupaten Bulukumba terdiri dari dua bagian utama yaitu; kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung luas $\pm 11.833,47$ Ha (10,25 persen) dan kawasan budidaya luas $\pm 103.633,53$ Ha (89,75 persen) dari luas wilayah Kabupaten Bulukumba. Wilayah budidaya sudah diperuntukan untuk kepentingan pembangunan sektoral antara lain di sektor pertanian, industri, dan sosial lainnya. Luas dan letak masing-masing peruntukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

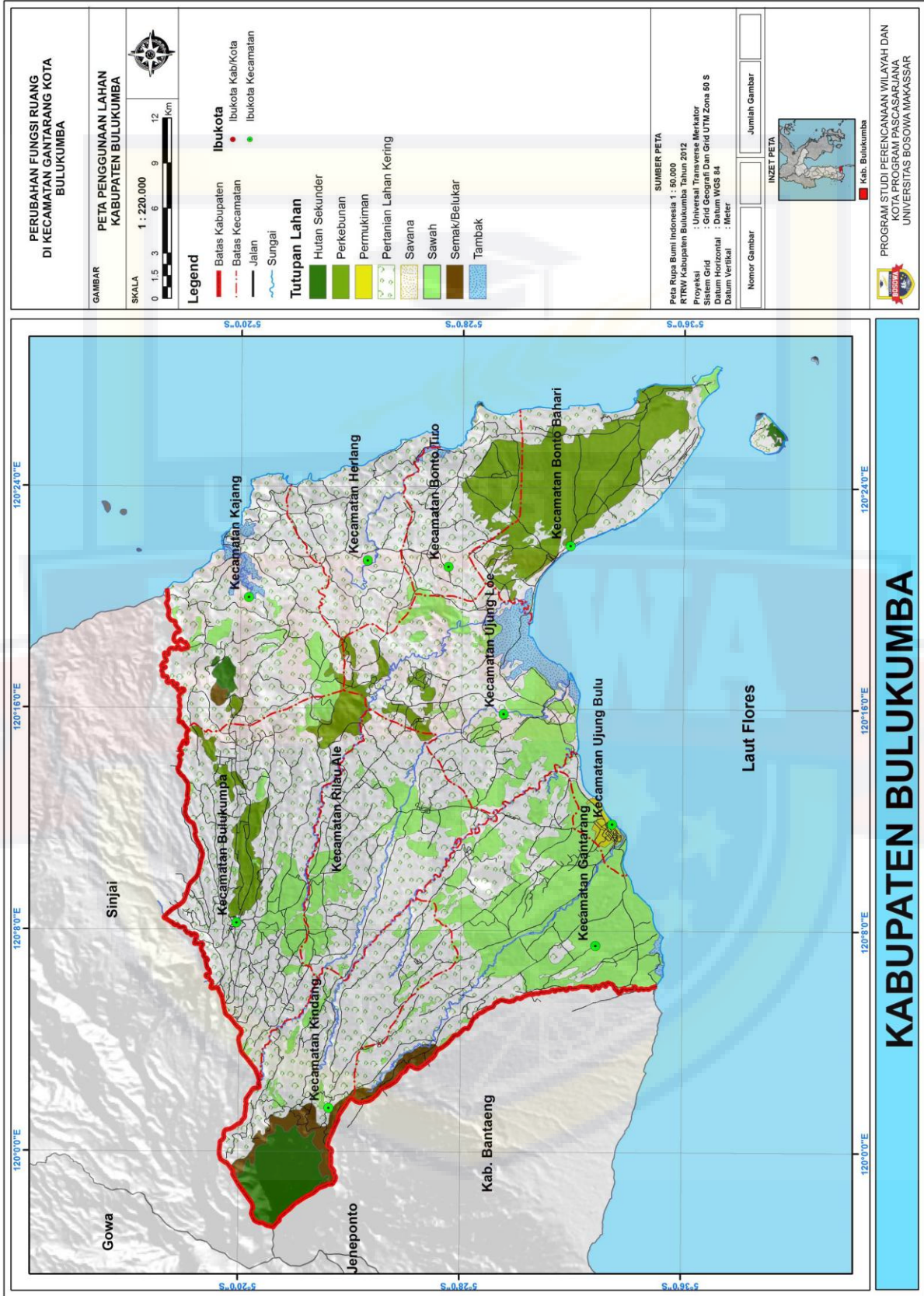
Tabel 4.2
Rincian Tata Guna Lahan di Kabupaten Bulukumba

No.	Jenis Peruntukan	Luas (Ha)	Lokasi	
1	Pemukiman	3.502,81	Tersebar disemua kecamatan, terutama kecamatan Ujung Bulu yang wilayahnya merupakan ibukota Kabupaten Bulukumba	
2	Persawahan	20.737,06	Kecamatan Gantarang, Ujung Bulu, Rilau ale dan Bulukumpa	
3	Kebun campur	22.229,39	Tersebar di semua Kecamatan, kecuali Kecamatan Ujung Bulu	
4	Tegalan / Kawasan Perikanan	26.105,29	Kec. Gantarang, bagian selatan, Kec. Ujung Bulu, bagian timur, Kec. Ujung Loe, bagian barat, Kec. Bontobahari dan Kajang	
5	Perkebunan	15.565,76	Diarahkan untuk semua kecamatan, kecuali Kecamatan Ujung Bulu.	
6	Kawasan lindung Kawasan yg memberi perlindungan terhadap kawasan bawahnya Kawasan perlindungan Setempat	15.493,21	Kecamatan Kindang dan Bulukumpa	
		6.394		
		107,5		Kecamatan Ganttarang
		118,7		Kecamatan Ujung Bulu
		121,9		Kecamatan Ujung Loe
		475		Kecamatan Bonto Bahari
		105,6		Kecamatan Bonto Tiro
		155,6		Kecamatan Herlang
		187,5		Kecamatan Kajang
		3.475		Kecamatan bonto Bahari
7	Kawasan suaka alam Hutan bakau	331,17	Kecamatan Kacang	
		30	Kecamatan Ujung Bulu	
		170	Kecamata Ujung Loe	
		199	Kecamatan Kajang	
		100	Kecamatan Herlang	
		25	Kecamatan Bonto Tiro	
		25	Kecamatan Gantarang	
7	Penggunaan lain-lain	15.493,21		

Sumber: BPN Kab.Bulukumba, 2016



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba



Gambar 4.2 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bulukumba

2. Kajian Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Bulukumba diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Bulukumba sebagai pusat kegiatan wilayah dibidang agroindustri, pertanian, perikanan dan pariwisata.

Arahan sistem jaringan struktur ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan, Bulukumba untuk sistem jaringan transportasi nasional terdapat jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalur kereta api dan lintas penyeberangan antarpulau. Sedangkan arahan pola ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan Bulukumba untuk kawasan lindung nasional terdapat taman hutan raya Bontobahari dan kawasan budidaya strategis adalah kawasan andalan Bulukumba adalah pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan dan kawasan laut teluk bone untuk perikanan dan pariwisata.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bulukumba yang diklasifikasi sesuai dengan penetapan kawasan dalam RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 yang memiliki potensi pengembangan wilayah dibagi terhadap beberapa kawasan yang secara eksplisit.

a. Kawasan Budidaya

Berdasarkan jenis peruntukannya, kawasan budidaya di Kabupaten Bulukumba terdiri atas sembilan jenis kawasan peruntukan yaitu sebagai berikut:

1) Kawasan peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Bulukumba dengan luas kawasan 1.972 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, Bontobahari, Bontotiro, dan sebagian Kecamatan Ujungbulu.

2) Kawasan peruntukan Hutan Rakyat

Untuk kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba dengan luas mencapai 22.273 Ha ditetapkan di sebagian wilayah pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba.

3) Kawasan peruntukan Pertanian

Berdasarkan klasifikasi jenisnya, maka kawasan pertanian di Kabupaten Bulukumba terbagi atas empat jenis kawasan peruntukan pertanian yakni, kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, dan kawasan peruntukan peternakan. Untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luasan 62.975 Ha yang terdiri dari beberapa komoditas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan dan sayur-sayuran ditetapkan pada sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba dengan luas area sebesar 2.700 Ha, kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 23.916 Ha juga tersebar di sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, sedangkan untuk kawasan peruntukan peternakan juga tersebar di sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba dengan berbagai jenis spesies ternak.

4) Kawasan peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Bulukumba berdasarkan jenis klasifikasi peruntukannya terbagi atas tiga yaitu kawasan peruntukan perikanan tangkap yang ditetapkan pada tujuh Kecamatan yang memiliki wilayah pesisir dan laut, Kecamatan Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe, Bonto, kawasan peruntukan budidaya perikanan di tetapkan di sebagian wilayah pada delapan Kecamatan di Kabupaten Bulukumba yakni Kecamatan Ujungbulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Herlang, Kajang dan Kecamatan Gantarang, sedangkan untuk kawasan pengolahan ikan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, Gantarang, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro dan Kecamatan Herlang. Untuk kawasan peruntukan perikanan yang akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Kajang sebagai pusat pengembangan dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, Gantarang, Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Bontotiro, dan Kecamatan Herlang ditetapkan sebagai zona penyanggah.

5) Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan terdiri atas usaha pertambangan mineral dan batubara yang ditetapkan di sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, sedangkan pertambangan minyak dan gas bumi ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kajang, Bontobahari, Bontotiro, Herlang dan Kecamatan Gantarang.

6) Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bulukumba terdiri atas tiga jenis kawasan peruntukan yaitu kawasan peruntukan industri besar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang dengan jenis industri pengolahan kapas dan pengolahan kayu, Kecamatan Ujung Loe, dan Bulukumpa dengan jenis industri pengolahan karet, kawasan peruntukan industri sedang yang merupakan pembuatan industri kapal ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sedangkan kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, Ujung Loe, Ujungbulu, Bontotiro, Herlang, Kindang, Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa.

7) Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Bulukumba dibagi atas tiga jenis kawasan peruntukan yaitu:

a) Kawasan Peruntukan Wisata Budaya, terdiri atas:

- Kawasan adat Amma Toa Kajang, di Kecamatan Kajang.
- Kawasan makam Samparaja Karaeng Sapu Batu, di Desa Tri Tiro Kecamatan Bontotiro.
- Kawasan situs Pua Jango, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan situs Karangpuang, di Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa.
- Kawasan makam Al-Maulana Khatib Bungsu (Dato Tiro), di Hila-hila Kecamatan Bontotiro.

- Kawasan makam Launru Daeng Biasa (Karaeng Ambibia) di Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro.

b) Kawasan Peruntukan Wisata Alam, terdiri dari:

- Kawasan Gua Passohara, di Desa Ara Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Gua Malukua, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Gua Liukang Panikia, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Perkebunan Karet, di Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Bulukumpa.
- Kawasan Pantai Pasir Putih Tanjung Bira, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Pantai Pasir Putih Lemo-lemo di Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Pantai Mandala Ria, di Desa Ara Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Pantai Samboang, di Samboang Kecamatan Bontotiro.
- Kawasan Pulau Liukang Loe, di Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Permandian alam Limbua, di Kecamatan Bontotiro.
- Kawasan Permandian Sumur Panjang, di Hila-hila Kecamatan Bontotiro.
- Kawasan Permandian Alam Bravo di Kelurahan Borong Rappoa di Kecamatan Kindang.
- Kawasan Danau Buhung Tujuh Kahayya, di Desa Kindang Kecamatan Kindang.
- Kawasan Pantai Panrang Luhu, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari

- Kawasan Pantai Marumasa, di Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari.

- Kawasan Pantai Kasuso, di Kecamatan Bontobahari.

- Kawasan Permandian Alam Seppenge' di Desa Bontomate'ne Kecamatan Rilau Ale.

- Kawasan Permandian Alam Bombang Tellue di Kecamatan Rilau Ale. dan

- Kawasan Permandian Alam Kantang, Jodoh di Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale.

c) Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan, terdiri dari:

- Kawasan Agrowisata di Kecamatan Bulukumpa dan Rilau Ale
- Kawasan Pembuatan Perahu Phinisi, di Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Agrowisata Tambak di Kecamatan Ujung Loe.
- Kawasan Dermaga Leppe'E di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujungbulu.

8) Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas dua jenis peruntukan permukiman yaitu kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya, dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

9) Kawasan peruntukan lainnya

b. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan di:

- 1) Kawasan pengembangan perkotaan *water front city* di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
- 2) Kawasan pengembangan minapolitan merupakan kawasan *marine politan center*, terdiri dari:
 - a) kawasan minapolitan untuk pengembangan komoditas budidaya perikanan laut ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Gantarang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujungbulu, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujung Loe, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontobahari, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontotiro, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Herlang, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajang; dan
 - b) kawasan minapolitan untuk pengembangan komoditas perikanan tangkap ditetapkan di seluruh wilayah Kecamatan pesisir dan dipusatkan di Kecamatan Kajang.
 - c) kawasan pusat pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Gantarang;
 - d) kawasan agrowisata di Desa Bululohe Kecamatan Rilau Ale;
 - e) kawasan pusat pengembangan pariwisata di Kecamatan Bontobahari; kawasan perdagangan di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
 - f) kawasan Bandar Udara Pengumpan di Kecamatan Bontobahari; dan

- g) kawasan ekowisata Tabbuakkang di Kecamatan Kindang.
- 3) KSK dengan sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan di Kawasan pembuatan Perahu Pinisi di Kecamatan Bontobahari;
- 4) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup ditetapkan di Kawasan Danau Kahaya di Kecamatan Kindang.
- 5) Kawasan pusat pengembangan agropolitan ditetapkan akan dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

c. Aspek Demografis

1) Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba tahun 2015 mencapai 410.485 jiwa, dengan kepadatan penduduk 355 jiwa per km. Ini berarti mengalami peningkatan 0,66 persen dari tahun 2014.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Kabupaten Bulukumba 2010-2015

No	Kecamatan	2010 (jiwa)	2011 (jiwa)	2012 (jiwa)	2013 (jiwa)	2014 (jiwa)	2015 (jiwa)
1	Gantarang	71.158	71.741	72.183	72.891	73.545	74.061
2	Ujungbulu	48.126	48.518	48.816	49.298	51.916	52.832
3	Ujung Loe	39.533	39.859	40.105	40.496	40.834	41.114
4	Bontobahari	23.976	24.180	24.328	24.561	24.848	25.040
5	Bontotiro	22.808	23.004	23.146	23.365	22.237	22.075
6	Herlang	24.128	24.332	24.481	24.717	24.452	24.507
7	Kajang	47.080	47.467	47.764	48.227	48.188	48.411
8	Bulukumpa	50.835	51.252	51.568	52.073	51.861	52.059
9	Rilau Ale	37.809	38.121	38.358	38.730	39.174	39.473
10	Kindang	29.815	30.057	30.241	30.542	30.720	30.913
BULUKUMBA		395.268	398.531	400.990	404.900	407.775	410.485

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2016

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 yaitu rata-rata 355 jiwa per km². Kecamatan Ujungbulu mempunyai kepadatan yang tinggi dikarenakan sebagai ibukota kabupaten dan aktivitas yang tinggi dengan jumlah penduduk yang besar dan luas daerah relatif kecil jika dibandingkan kecamatan lainnya.

Tabel 4.4
Rata-rata Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba per km² Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	
1	Gantarang	173.51	74.061	427	
2	Ujungbulu	14.44	52.832	3.659	
3	Ujung Loe	144.31	41.114	285	
4	Bontobahari	108.60	25.040	231	
5	Bontotiro	78.34	22.075	282	
6	Herlang	68.79	24.507	356	
7	Kajang	129.06	48.411	375	
8	Bulukumpa	171.33	52.059	304	
9	Rilau Ale	117.53	39.473	336	
10	Kindang	148.76	30.913	208	
		2015	1,156.67	410.485	355
		2014	1,156.67	407.775	353
	BULUKUMBA	2013	1,156.67	404.900	351
		2012	1,156.67	400.990	347
		2011	1,156.67	398.531	345

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2016

4. Aspek Kesejahteraan

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Bulukumba telah menunjukkan peningkatan walaupun perkembangannya belum optimal. Berbagai program yang telah dilaksanakan mampu memberikan hasil yang cukup baik, hal ini ditandai dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba. Tabel di bawah ini menyajikan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba tahun 2011-2015.

Tabel 4.5
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Jumlah	Pertumbuhan (%)	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2011	5.306.438,46	11,93	5.000.759,77	5,49
2012	6.243.256,28	17,65	5.483.244,72	9,65
2013	7.170.121,62	14,84	5.910.218,41	7,79
2014	8.345.258,97	16,39	6.395.647,81	8,21
2015	9.482.420,10	13,62	6.777.428,70	5,97
Rata-Rata		14,89		7,42

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2016

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba lima tahun terakhir (2011-2015) menunjukkan harga berlaku rata-rata mencapai 14,89 persen dan harga konstan mencapai 7,42 persen. Distribusi persentase sumbangan sektor lapangan usaha terdapat Total PDRB Kabupaten Bulukumba lima tahun terakhir masih didominasi sektor pertanian.

b. Struktur Ekonomi

Bila melihat perhitungan PDRB Kabupaten Bulukumba, selain dapat diketahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi, juga dapat diketahui peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB Kabupaten Bulukumba. Peranan dari masing-masing lapangan usaha ini menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Bulukumba. Semakin besar peranan suatu lapangan usaha maka semakin besar pula pengaruhnya dalam perkembangan perekonomian di daerah ini.

Kontribusi PDRB tertinggi tahun 2015 terletak pada lapangan usaha yang terdiri atas pertanian, kehutanan, dan perikanan 42,46 persen, yang diikuti dengan Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 14,72 persen

kemudian konstruksi 8,88 persen. Untuk lebih lengkapnya tabel berikut akan menggambarkan persentase kontribusi PDRB setiap lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku.

B. Gambaran Umum Kecamatan Gantarang

1. Keadaan Geografis

a) Letak dan Luas wilayah

Secara administratif Kecamatan Gantarang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bulukumba dengan luas wilayah 17.351 Ha dengan batas administrasi terdiri atas;

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kindang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ujung Bulu
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ujung Loe

Kecamatan Gantarang terdiri atas tiga Kelurahan dan tujuh belas desa. dari dua puluh desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Gantarang, Desa Polewali merupakan desa yang memiliki luasan lebih besar dari desa dan kelurahan lainnya dengan luas wilayah 12,62 Km². dan Kelurahan yang paling terkecil luasnya adalah Kelurahan Matteko dengan luas 2,68 Km². Untuk lebih jelas lihat tabel selain itu karakteristik kawasan diantaranya terdiri dari karakteristik Pantai dan bukan pantai. untuk lebih jelas lihat tabel 4.5 Luas wilayah, status dan klasifikasi menurut desa/kelurahan di Kecamatan Gantarang.

Tabel 4.6
Luas wilayah, status dan klasifikasi menurut desa/kelurahan
di Kecamatan Gantarang

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Status
1	Mario Rennu	11,79	Kelurahan
2	Jalanjang	11,46	Kelurahan
3	Matteko	2,68	Kelurahan
4	Paenre Lompoe	5,15	Desa
5	Biolo	6,40	Desa
6	Bonto Macinna	12,16	Desa
7	Bontomasila	7,74	Desa
8	Padang	11,08	Desa
9	Barombong	5,06	Desa
10	Bonto Sunggu	5,30	Desa
11	Polewali	12,62	Desa
12	Palambarae	9,93	Desa
13	Bukit Tinggi	5,03	Desa
14	Bontonyeleng	11,00	Desa
15	Bukit harapan	11,33	Desa
16	Dampang	8,14	Desa
17	Bontoraja	12,29	Desa
18	Benteng Gattareng	7,07	Desa
19	Gattareng	6,11	Desa
20	Benteng Malewang	11,17	Desa
21	Taccorong	5,53	Desa
Jumlah		173,51	

Sumber: Kecamatan Gantarang Dalam angka 2015

b) Topografi

Keadaan topografi Kecamatan Gantarang sebagian besar terdiri dari 0-25 mdpl dengan luas 39,20 Km², 25-100 mdpl dengan luasan 37,78 Km², 100-500 mdpl dengan luasan 23,03 Km². Kondisi ini membawa pengaruh terhadap perkembangan wilayahnya, dimana proses perkembangan penggunaan lahan pada bagian tertentu dipengaruhi oleh faktor-faktor alam sebagai limitasi dalam pengembangan fisik kawasan perencanaan seperti tingkat kelandaian dan wilayah pesisir.

c) Penggunaan Lahan

Pemanfaatan lahan di Kecamatan Gantarang dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar seperti kondisi fisik dasar lahan dan aktivitas masyarakat disekitarnya. di Kecamatan Gantarang pemanfaatan lahan dominan adalah lahan pertanian dengan total luas lahan pertanian 16.314 Ha dari total luas lahan 17.351 Ha. untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.6. Luas lahan pertanian dan non pertanian menurut desa/kelurahan di Kecamatan Gantarang.

Tabel 4.7
Luas Lahan Pertanian Dan Non Pertanian Menurut Desa/Kelurahan
Di Kecamatan Gantarang

No	Desa/Kelurahan	Lahan Pertanian (Ha)	Lahan Non Pertanian (Ha)
1	Mario Rennu	1110	66,00
2	Jalanjang	1102,11	43,89
3	Matteko	206,02	61,80
4	Paenre Lompoe	504,66	10,34
5	Biolo	612,15	27,85
6	Bonto Macinna	1183,25	32,75
7	Bontomasila	709,95	64,05
8	Padang	1054,54	53,46
9	Barombong	459,26	46,74
10	Bonto Sunggu	473,03	56,97
11	Polewali	1207	55,00
12	Palambarae	961,69	31,31
13	Bukit Tinggi	454,21	48,79
14	Bontonyeleng	1056,81	43,19
15	Bukit harapan	1078,64	54,36
16	Dampang	745,11	68,89
17	Bontoraja	1174,07	54,93
18	Benteng Gattareng	628,32	78,68
19	Gattareng	531	80,00
20	Benteng Malewang	1059	58,00
21	Taccorong		
Jumlah		16310	1037,00

Sumber: Kecamatan Gantarang Dalam angka 2015

2. Kependudukan

Kecamatan Gantarang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bulukumba yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dari kecamatan yang

lainnya. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kecamatan Gantarang 72.891 dengan kepadatan penduduk rata-rata 240 jiwa/Km². jumlah penduduk terbanyak berada di Desa Paenre Lompoe dengan jumlah penduduk 5.146 Jiwa dan tingkat kepadatan penduduk 999 Jiwa/Km². dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Desa Barombong dengan jumlah penduduk 1.669 Jiwa dan kepadatan penduduk 330 Jiwa/Km². untuk lebih jelas lihat tabel 4.7 Jumlah Kepala Keluarga, penduduk, luas dan kepadatan menurut desa/kelurahan di Kecamatan Gantarang tahun 2014.

Tabel 4.8
Jumlah Kepala Keluarga, penduduk, luas dan kepadatan menurut
desa/kelurahan di Kecamatan Gantarang tahun 2014

No	Desa/Kelurahan	Kepala Keluarga	Penduduk (JIwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Mario Rennu	924	4.422	11,79	375
2	Jalanjang	938	4.897	11,46	427
3	Matteko	943	3.768	2,68	1406
4	Paenre Lompoe	1.075	5.146	5,15	999
5	Biolo	832	2.968	6,40	464
6	Bonto Macinna	1.228	4.329	12,16	356
7	Bontomasila	655	2.854	7,74	369
8	Padang	911	3.530	11,08	319
9	Barombong	536	1.669	5,06	330
10	Bonto Sunggu	591	2.381	5,30	449
11	Polewali	828	5.075	12,62	715
12	Palambarae	845	3.685	9,93	371
13	Bukit Tinggi	608	2.540	5,03	505
14	Bontonyeleng	854	3.072	11,00	279
15	Bukit harapan	756	2.743	11,33	242
16	Dampang	1.070	4.182	8,14	514
17	Bontoraja	960	3.711	12,29	302
18	Benteng Gattareng	748	3.080	7,07	436
19	Gattareng	967	4.003	6,11	655
20	Benteng Malewang	645	2.603	11,17	233
21	Taccorong	476	2.233	5,53	404
Jumlah		17.390	72.891	173,51	420

Sumber: Kecamatan Gantarang Dalam angka 2015

3. Kondisi Sosial Budaya

Potensi lain yang dimiliki Kabupaten Bulukumba dan khususnya Kecamatan Gantarang yakni kebudayaan masyarakat yang masih menjunjung semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Semangat gotong royong

dalam proses pembangunan ini cenderung semakin meningkat baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, maupun mendorong dalam upaya yang konkrit dan memperkaya khasanah kebudayaan nasional. Hal itu tergambar dalam slogan “mali siparappe, tallang sipahua” yang merupakan sebuah ungkapan perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis Makassar yang menggambarkan sikap batin Masyarakat Bulukumba untuk mengembangkan amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spiritual, dunia dan akhirat.

4. Ketersediaan Sarana

a. Sarana Pendidikan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Menunjuk pada amanat UUD 1945 beserta amandemennya (Pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk menggap pendidikan, terutama penduduk kelompok usia sekolah. dari data Kecamatan Gantarang dalam angka jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Gantarang yaitu, SD 47 unit, SMP 9 unit dan SMA 2 unit. untuk lebih jelas lihat tabel 4.8. Jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Gantarang tahun 2014.

Tabel 4.9
Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Gantarang Tahun 2014

NO	Desa/Kelurahan	SD	SLTP	SMU
1	Mario Rennu	2	-	
2	Jalanjang	2	-	
3	Matteko	2	2	
4	Paenre Lompoe	3	-	
5	Biolo	3	1	
6	Bonto Macinna	3	-	
7	Bontomasila	2	1	
8	Padang	1	-	
9	Barombong	1	-	
10	Bonto Sunggu	3	-	1
11	Polewali	3	-	1
12	Palambarae	1	-	
13	Bukit Tinggi	2	1	
14	Bontonyeleng	2	-	
15	Bukit harapan	2	1	
16	Dampang	4	-	
17	Bontoraja	2	1	
18	Benteng Gattareng	2	1	
19	Gattareng	4	-	
20	Benteng Malewang	2	-	
21	Taccorong	1	1	
	Jumlah	47	9	2

Sumber: Kecamatan Gantarang Dalam angka 2015

b. Sarana Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dari ajang peningkatan SDM, maka program kesehatan telah dimulai atau bahkan lebih diprioritaskan pada calon generasi pemuda khususnya bayi dan anak usia dibawah lima tahun. jenis sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Gantarang yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmasdes dan Posyandu.

Tabel 4.10
Jumlah Sarana Kesehatan Di Kecamatan Gantarang Tahun 2014

No	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poskesdes	Posyandu
1	Mario Rennu	-	-	1	-	4
2	Jalanjang	-	-	-	1	4
3	Matteko	-	1	-	-	4
4	Paenre Lompoe	-	-	-	1	6
5	Biolo	-	-	-	1	4
6	Bonto Macinna	-	-	1	-	5
7	Bontomasila	-	-	-	1	4
8	Padang	-	-	-	1	4
9	Barombong	-	-	-	1	3
10	Bonto Sunggu	-	-	1	-	3
11	Polewali	-	-	-	1	6
12	Palambarae	-	-	-	1	4
13	Bukit Tinggi	-	-	-	1	4
14	Bontonyeleng	-	-	1	-	4
15	Bukit harapan	-	-	1	1	4
16	Dampang	-	-	1	-	4
17	Bontoraja	-	-	-	1	4
18	Benteng Gattareng	-	-	-	1	5
19	Gattareng	-	1	-	-	6
20	Benteng Malewang	-	-	-	1	5
21	Taccorong	-	-	-	1	4
Jumlah		-	2	6	-	91

Sumber: Kecamatan Gantarang Dalam angka 2015

c. Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan berperan penting dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder maupun kebutuhan tersier dalam bentuk sandang, pangan maupun papan. jumlah sarana perdagangan di Kecamatan Gantarang berupa pasar umum sebanyak 10 unit yang tersebar di sepuluh desa/kelurahan di Kecamatan Gantarang.

C. Karakteristik Lokasi Penelitian

1. Karakteristik Fisik

Lokasi penelitian ini mencakup Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali yang berada pada wilayah administrasi Kecamatan Gantaran dengan pemanfaatan lahan yang berkembang meliputi lahan permukiman, sawah, sarana permukiman,

dan lain-lain. Permukiman yang berkembang di lokasi penelitian adalah permukiman formal maupun informal. Kondisi topografi di Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali adalah datar hingga bergelombang.



Gambar 4.3 Kondisi Permukiman di Lokasi Penelitian

Sumber: Data Primer

Gambar 4.3 diatas menunjukkan perbedaan permukiman formal dan non formal yang dihuni oleh penduduk lokal yang didominasi rumah panggung, sedangkan hunian formal yang dikembangkan pengembang dihuni oleh penduduk pendatang. Proses ini bila dikonteksikan secara visual terjadi pebedaan mencolok dari segi desain arsitektural, disatu sisi hunian penduduk lokal dicirikan dengan rumah panggung dengan konstruksi dominan menggunakan kayu, sedangkan

hunian yang dihuni oleh penduduk pendatang didominasi dengan desain minimalis dengan konstruksi tembok.

2. Perkembangan Fungsi-Fungsi Perkotaan di Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali

Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali merupakan wilayah peri urban di Kota Bulukumba yang mengalami perkembangan dari wilayah yang tadinya berciri pertanian kemudian bergeser menjadi daerah perkotaan yang didominasi fungsi permukiman formal yang dikembangkan oleh pihak pengembang (swasta). Seiring dengan perkembangan yang terjadi pada Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali maka fungsi-fungsi perkotaan akan semakin berkembang berjalan sejajar dengan perkembangan jumlah penduduk dan aktifitas hunian masyarakat untuk menunjang kegiatan penduduk dalam rangka peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi.

3. Aksesibilitas

Kondisi aksesibilitas yang merupakan kemudahan bagi penduduk dalam menjangkau suatu lokasi yang dinyatakan dalam jarak, waktu dan biaya. Namun aksesibilitas di Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali kurang memadai dari sisi pelayanan sarana transportasi. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya pelayanan angkutan umum, namun sebagian besar moda angkutan yang dimanfaatkan oleh sebagian penduduk Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali dominan menggunakan angkutan pribadi.

4. Kondisi Sosial Masyarakat Kawasan Peri Urban Kota Bulukumba

a. Struktur Masyarakat

Adanya penduduk pendatang di Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali baik pendatang yang inves, Pegawai/PNS, wiraswasta, pedagang yang meneta pada hunian formal yang dikembangkan di Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali mengakibatkan terjadinya hubungan-hubungan fungsional dengan masyarakat setempat (penduduk lokal) karena secara tidak langsung akan saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya, sebagai upaya untuk kebutuhan sehari-hari. Secara otomatis akan terbangun hubungan sosial dan bahkan terbentuk satus sosial masyarakat yang didominasi oleh perbedaan kelas baik dari segi ekonomi maupun pendidikan.

b. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian Penduduk

Perkembangan Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewa sebagai daerah pengembangan baru wilayah peri urban Perkotaan Bulukumba merekondisi terjadinya proses pembangunan yang pesat ditandai dengan pembangunan kawasan hunian formal sejak tahun 2007. Hal ini mengakibatkan karakteristik ekonomi dan mata pencaharian pun bervariasi. Pada penduduk lokal didominasi masyarakat petani, sedangkan pada penduduk pendatang didominasi oleh pegawai/PNS. Proses pembauran dua komunitas masyarakat ini akan membeikan dampak terhadap stuktur sosial masyarakat yang ada di Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali. Lambat laun kedepan masyarakat lokal akan mengalami perubahan masyarakat mengarah kearah kemajuan ekonomi untuk meningkatkan martabat manusia, sehingga perubahan masyarakat sendiri diubah menjadi

kemajuan masyarakat. Pola kehidupan agraris berubah menjadi pola hidup baru di bidang perdagangan dan usaha-usaha penyediaan jasa akan berkembang di Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali sering dengan semakin berkurangnya lahan produktif pertanian yang dikembangkan kearah permukiman formal. Pada dasarnya manusia dengan kemajuannya untuk menerima dan menyesuaikan diri mengambil tindakan lebih aktif dalam hidupnya. Perubahan dalam bidang materi lebih mudah terjadi, karena itu juga penggunaan materi mendahului penyesuaian mental. Sebaliknya perubahan mental paling sukar terjadi.

c. Hubungan Sosial

Proses suburbanization dan urban agglomeration dari kota ke daerah peri urban, secara langsung maupun tidak, akan menimbulkan konflik sosial dan budaya masyarakat di Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewa. Masyarakat kota dipandang oleh masyarakat desa, sebagai masyarakat yang lebih tinggi strata sosial, ekonomi dan budayanya. Konsep-konsep kemajuan dan modern telah merubah persepsi masyarakat desa cenderung berkiblat ke kota, meskipun mereka tetap mempertahankan tradisi lama dalam lingkup dusun. Di kalangan masyarakat Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewa sendiri, dapat dilihat adanya perbedaan dalam menyikapi proses perubahan ini. Generasi tua lebih mampu bertahan dalam menjaga sendi-sendi sosial dan budaya lokal disbanding dengan generasi muda.

Kehidupan sosial pendatang yang tinggal di lingkungan kampung menyatu dalam kegiatan kemasyarakatan, peduli dan mau berinteraksi dengan tetangga atau lingkungan sekitar. Jika ada kerenggangan interaksi antara pendatang dan penduduk lokal tidak semata-mata disebabkan oleh sikap para pendatang saja,

namun juga para penduduk lokal. Dalam kegiatan yang bersifat kemasyarakatan umumnya hanya melibatkan penduduk lokal saja tanpa mengajak peran serta para pendatang, sehingga menimbulkan keengganan bagi para pendatang sendiri.

5. Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini terdiri dari masyarakat yang bermukim di lokasi penelitian berjumlah 100 responden yang terdiri dari 70 responden penduduk lokal dan 30 responden penduduk pendatang. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal Mei 2015 – Agustus 2015 sehingga dari data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan jenis kelamin terhadap 100 sampel di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jawaban Responden	Penduduk Lokal		Penduduk Pendatang	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	45	64,29	16	53,33
2	Perempuan	25	35,71	14	46,67
	Jumlah	70	100,00	30	100,00

Sumber: Data Primer, 2015

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat memberi gambaran responden penduduk lokal bahwa sebanyak 45 responden atau 64,29 %, adalah masyarakat berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 25 responden atau 35,71 % berjenis kelamin perempuan. Sedangkan responden penduduk pendatang sebanyak 16 responden atau 53,33 % adalah masyarakat berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 14 responden atau 46,67 % berjenis kelamin perempuan.

b. Usia Responden

Berdasarkan usia responden terhadap 100 sampel di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia Responden

No	Jawaban Responden	Penduduk Lokal		Penduduk Pendatang	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1	< 20 tahun	0	0,00	0	0,00
2	21 - 30	7	10,00	2	6,67
3	31 - 40	32	45,71	19	63,33
4	41 - 50	29	41,43	9	30,00
5	> 50	2	2,86	0	0,00
	Jumlah	70	100,00	30	100,00

Sumber: Data Primer, 2015

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat memberi gambaran responden penduduk lokal bahwa responden dengan rentang usia antara < 20 tahun sebanyak 0 responden atau 0,00 %, usia 21 – 30 tahun sebanyak 7 responden atau 10,00 %, usia 31 – 40 tahun sebanyak 32 atau 45,71 %, usia 41 – 50 tahun sebanyak 29 responden atau 41,43 %, usia > 50 tahun sebanyak 2 responden atau 2,86 %. Sedangkan responden penduduk pendatang dengan rentang usia antara < 20 tahun sebanyak 0 responden atau 0,00 %, usia 21 – 30 tahun sebanyak 2 responden atau 6,67 %, usia 31 – 40 tahun sebanyak 19 atau 63,33 %, usia 41 – 50 tahun sebanyak 9 responden atau 30,00 %, usia > 50 tahun sebanyak 0 responden atau 0,00 %.

c. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan tingkat pendidikan responden terhadap 100 sampel di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.13
Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jawaban Responden	Penduduk Lokal		Penduduk Pendatang	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD	7	10,00	0	0,00
2	SLTP	29	41,43	0	0,00
3	SLTA	32	45,71	7	23,33
4	D3	0	0,00	2	6,67
5	Sarjana/S1	2	2,86	21	70,00
	Jumlah	70	100,00	30	100,00

Sumber: Data Primer, 2015

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat memberi gambaran responden penduduk lokal bahwa tingkat pendidikan terbesar responden adalah SLTA sebanyak 32 orang atau 45,71%, SD sebanyak 7 orang atau 10,00%, SLTP sebanyak 29 orang atau 41,43%, Sarjana (S1) sebanyak 2 orang atau 2,86%, dan Diploma sebanyak 0 orang atau 0%. Sedangkan responden penduduk pendatang dengan tingkat pendidikan terbesar responden adalah Sarjana (S1) sebanyak 21 orang atau 70,00%, SD sebanyak 0 orang atau 0,00%, SLTP sebanyak 0 orang atau 0,00%, SLTA sebanyak 7 orang atau 23,33% dan Diploma sebanyak 0 orang atau 0,00%.

d. Jenis Pekerjaan Responden

Berdasarkan jenis pekerjaan responden terhadap 100 sampel di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14
Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jawaban Responden	Penduduk Lokal		Penduduk Pendatang	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pengawai/PNS	1	1,43	14	46,67
2	Wiraswasta	9	12,86	11	36,67
3	Petani	41	58,57	0	0,00
4	Tidak Bekerja	3	4,29	0	0,00
5	Ibu Rumah Tangga	16	22,86	5	16,67
	Jumlah	70	100,00	30	100,00

Sumber: Data Primer, 2015

Tabel 4.14 diatas menunjukkan data hasil kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden diketahui bahwa responden penduduk lokal dengan profesi sebagai petani adalah yang terbesar, yakni sebanyak 41 responden 58,57 %, responden yang pekerjaannya sebagai pengawai/PNS sebanyak 1 responden atau 1,43 %, responden yang pekerjaannya sebagai wiraswasta sebanyak 9 responden atau 12,86 %, responden yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga sebanyak 16 responden atau 22,86 %, sedangkan yang tidak memiliki pekerjaan sebanyak 3 responden atau 4,29 %. Sedangkan responden penduduk pendatang dengan profesi sebagai pengawai/PNS adalah yang terbesar, yakni sebanyak 14 responden 46,67 %, responden yang pekerjaannya sebagai wiraswasta sebanyak 11 responden atau 36,67 %, responden yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga sebanyak 5 responden atau 16,67 %, sedangkan yang tidak memiliki pekerjaan sebanyak 0 responden atau 0,00 % begitu juga dengan pekerjaan petani 0 responden.

D. Perubahan Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Pinggiran Kota Bulukumba

Perkembangan Kabupaten Bulukumba dengan dinamikanya serta kedudukan sebagai PKW dalam konstalasi rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan merekondisi proses yang tiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini juga terlihat pada perubahan pemanfaatan lahan. Perubahan Pemanfaatan Lahan merupakan bentuk peralihan dari penggunaan lahan sebelumnya ke penggunaan lahan lain berikutnya (NILDA, 2014).

Pada lokasi penelitian, perubahan penggunaan lahan cenderung mengurangi penutupan lahan, baik untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam maupun perubahan fungsi pemanfaatan. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk, perkembangan aktifitas ekonomi, konflik kepentingan dan kurang keterpaduan antar sektor.

Perubahan penggunaan lahan meliputi pergeseran penggunaan lahan menuju penggunaan lahan yang berbeda (*Conversion*) atau intensifikasi pada penggunaan lahan yang sudah ada. Perubahan penggunaan lahan pada lokasi penelitian diperoleh dengan membandingkan dua peta dan data penggunaan lahan yaitu klasifikasi citra ALOS. Hasil perubahan penggunaan lahan diperlihatkan pada Tabel 4.15. Dari hasil pengelolaan spasial tampak adanya perubahan yang cukup bervariasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15
Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali

No	Pemanfaatan Ruang	Tahun 2006-2010 (Ha)	Persentase (%)	Tahun 2011-2015 (Ha)	Persentase (%)	Tahun 2017 (Ha)	Persentase (%)	Ket
1	Permukiman	58,04	5,99	63,6	6,57	71,03	7,34	Bertambah
2	Perdagangan	6,93	0,72	8,68	0,90	9,59	0,99	Bertambah
3	Fasilitas Sosial	6,03	0,62	6,03	0,62	6,62	0,68	Bertambah
4	Fasilitas Umum	5,82	0,60	5,86	0,61	6,45	0,67	Bertambah
5	Sawah	626,36	64,68	401,92	41,50	389,92	40,26	Berkurang
6	Kebun							Berkurang
	Campuran	82,41	8,51	82,25	8,49	76,65	7,92	Berkurang
7	Lahan Kosong	154,21	15,92	337,15	34,82	339,91	35,10	Bertambah
8	Sungai	2,22	0,23	2,22	0,23	2,22	0,23	Tetap
9	Taman Kota	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	Tetap
10	Jalan	26,33	2,72	60,64	6,26	65,96	6,81	Bertambah
	TOTAL	968,39	100,00	968,39	100,00	968,39	100,00	

Sumber: Hasil Analisis dengan GIS 2015

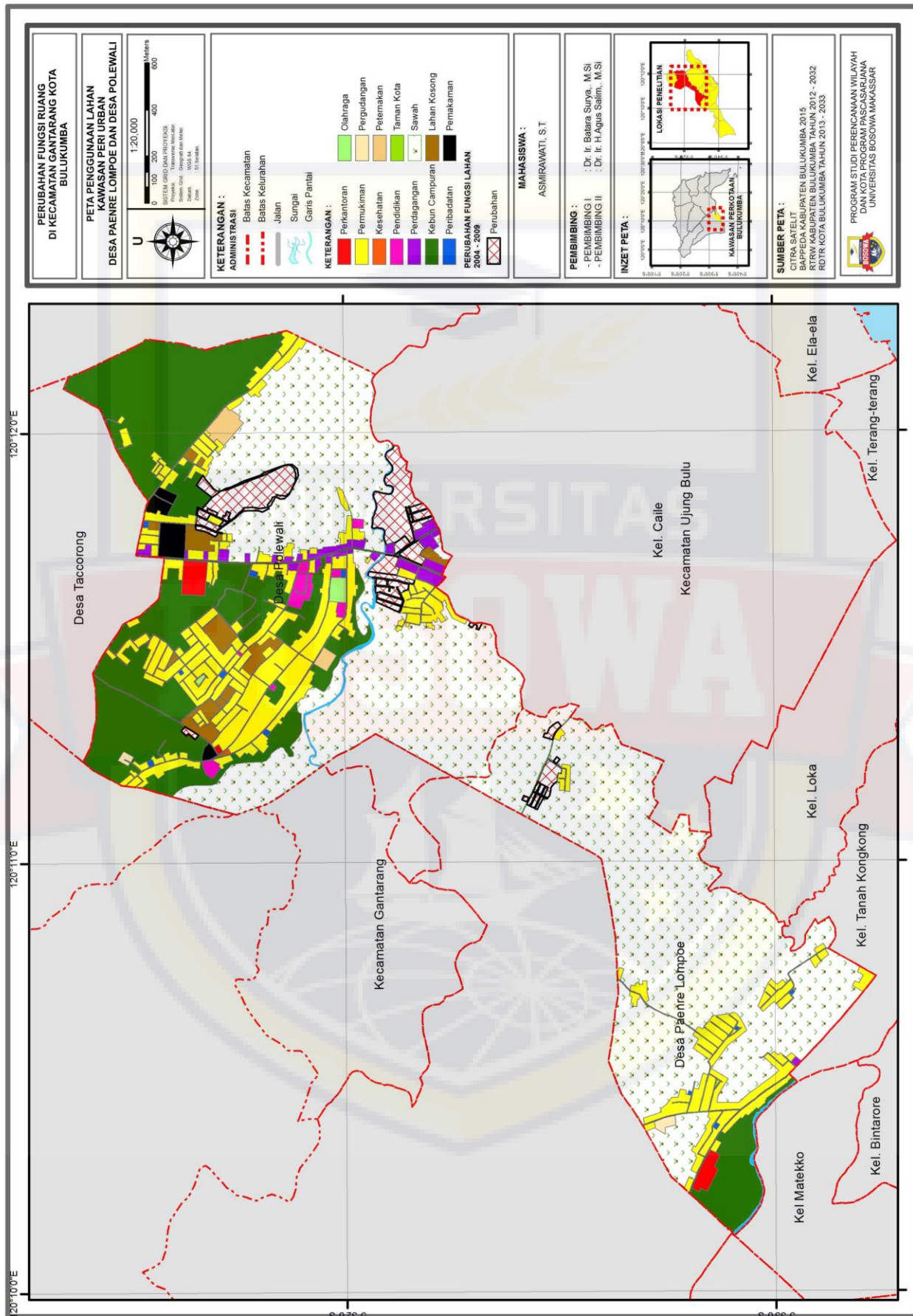
Tabel 4.15 di atas menunjukkan perubahan pemanfaatan lahan pada kawasan pinggiran Kota Bulukumba, dimana terlihat perubahan signifikan terjadi pada lahan sawah yang beralih fungsi menjadi lahan permukiman, perdagangan, dan sebagian menjadi lahan kosong yaitu mengalami pengurangan luasan sawah dari 626,36 Ha atau 64,68% menjadi 401,92 Ha atau 41,50% ditahun 2015 dan terus mengalami pengurangan luasan di tahun 2017 sebesar 389,92 Ha atau 40,26%. Sedangkan pemanfaatan lahan di kawasan peri urban Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali yang mengalami peningkatan meliputi lahan permukiman 58,04 Ha atau 5,99% menjadi 63,6 Ha atau 6,57% ditahun 2015 dan terus meningkat di tahun 2017 menjadi 71,03 Ha atau 7,34%, fungsi perdagangan 6,93 Ha atau 0,72% menjadi 8,68 Ha atau 0,90% di tahun 2015 dan terus mengalami peningkatan luasan di tahun 2017 dengan luasan 9,59 Ha atau 0,99%, lahan kosong 154,21 Ha atau 15,92% menjadi 337,15 Ha atau 34,82% ditahun 2015 dan terus bertambah luas lahan kosong sebagai area pengembangan kawasan permukiman menjadi 339,91 Ha atau 35,10% di tahun 2017, dan jalan dari luasan 26,33 Ha atau 2,72% menjadi 65,96 Ha atau 6,81%.

Fenomena perubahan pemanfaatan ruang di kawasan pinggiran Kota Bulukumba terkondisi akibat arahan rencana pemanfaatan ruang di Kabupaten Bulukumba yang menetapkan Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali sebagai daerah pengembangan baru yang diarahkan untuk pengembangan kawasan permukiman. Fakta di lapangan menunjukkan fenomena hunian formal yang mulai berkembang menyebabkan terjadinya transformasi spasial atau alih fungsi guna lahan dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman formal pada kawasan peri urban. Yunus (2001) menyebutkan transformasi spasial terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian adalah (a) hilangnya lahan pertanian, (b) gejala komersialisasi dan intensifikasi pertanian, (c) produksi dan produktivitas.

Perubahan penggunaan lahan di Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali dari lahan persawahan menjadi permukiman terkondisi akibat pengembangan wilayah peri urban memberikan kontribusi terhadap bentuk pemanfaatan lahan permukiman. Yunus, 2008 menyebutkan dampak transformasi spasial terhadap lahan permukiman merekondisi terjadinya penambahan jumlah luas lahan permukiman, pemadatan bangunan rumah mukim, serta kecenderungan segregasi rumah mukim. Fakta di lapangan menunjukkan penambahan luasan kawasan permukiman serta terjadinya perbedaan fisik hunian menyebabkan segregasi antar hunian penduduk lokal yang cenderung menggunakan model rumah panggung sedangkan disisi lain hunian formal yang dimukim oleh penduduk pendatang menggunakan model perumahan dengan konstruksi tembok. Selain proses tersebut transformasi kawasan permukiman juga berimplikasi terhadap peningkatan jumlah penduduk yang bermukim di hunian formal merekondisi

terjadinya pembauran komunitas antar komunitas lokal dan komunitas pendatang, secara tidak langsung proses perkembangan fungsi ruang yang terjadi merekondisi perubahan pola hubungan sosial dan beranekaragaman kegiatan ekonomi yang berkembang. Artinya pola penggunaan yang berubah akan memberikan kontribusi terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat. Perubahan memanfaatkan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman dengan skala besar, lambat laun kawasan pertanian akan disulap menjadi kawasan permukiman dan kawasan komersil lainnya, gejala ini yang disebut transformasi spasial dengan lahan pertanian disulap menjadi fungsi aktifitas perkotaan (Ariyanto, 2016).

BOSOWA



Gambar 4.4 Peta Penggunaan Lahan Kawasan Peri Urban Desa Paentre Lompoe dan Desa Polewali

E. Fungsi Ruang Bekerja Sebagai Determinan Perubahan Kondisi Sosial

Masyarakat

1. Deskripsi Responden

Deskripsi responden terkait kondisi sosial masyarakat di Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali meliputi dua variabel yang masing-masing memiliki tiga indikator/sub variabel adalah sebagai berikut.

a. Sistem Sosial Masyarakat

1) Hubungan Sosial

Data dari hasil kuesioner mengenai hubungan sosial yang terbangun di lokasi penelitian yang diambil melalui responden masyarakat meliputi 70 responden penduduk lokal dan 30 responden penduduk pendatang. Maka distribusi jawaban responden dan pembobotan terhadap hubungan sosial dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.16
Distribusi Persepsi Terhadap Hubungan Sosial

No	Jawaban Responden	Penduduk Lokal			Penduduk Pendatang		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	Hubungan Sesuai Profesi	21	30,00	21	18	60,00	18
2	Hubungan Sesuai tingkat Ekonomi	17	24,29	34	10	33,33	20
3	Hubungan dengan seluruh golongan masyarakat	32	45,71	96	2	6,67	6
Jumlah		70	100	151	30	100,00	44

Sumber: Hasil Analisis

Dari tabel 4.16 diatas, menunjukkan distribusi jawaban responden kuesioner mengenai indikator/subvariabel hubungan sosial bahwa responden penduduk lokal

yang menjawab hubungan sesuai profesi berjumlah 21 responden atau 30,00%, responden yang menjawab hubungan sesuai tingkat ekonomi berjumlah 17 responden atau sebesar 24,29%, dan responden menjawab hubungan dengan seluruh golongan masyarakat berjumlah 32 responden atau sebesar 45,71%. Sedangkan untuk responden penduduk pendatang yang menjawab hubungan sesuai profesi berjumlah 18 responden atau 60,00%, responden yang menjawab hubungan sesuai tingkat ekonomi berjumlah 10 responden atau sebesar 33,33%, dan responden menjawab Hubungan dengan seluruh golongan masyarakat berjumlah 2 responden atau sebesar 6,67%.

Proses diatas menunjukkan perbedaan hubungan sosial yang terbangun di Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali, dimana pada status masyarakat lokal hubungan yang terbangun masih didominasi pada hubungan sosial keseluruhan anggota masyarakat tanpa membedakan golongan maupun status ekonomi dengan presentase 45,71 %, akan tetapi mulai berorientasi pada model hubungan masyarakat perkotaan dikarenakan ada yang hubungan sesuai dengan profesi dan tingkat ekonomi sehingga nilai distribusi frekuensi dikategorikan cukup. Sedangkan pada penduduk pendatang minimnya masyarakat yang melakukan hubungan sosial pada seluruh golongan masyarakat dicirikan dengan nilai presentase 6,67 % sangat minim sedangkan hubungan sesuai dengan profesi mencapai 60,00 % dari total sampel. Hal ini merekondisi pada kawasan peri urban Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali yang dikembangkan sebagai daerah pengembangan permukiman baru menyebabkan perbedaan hubungan sosial yang terbangun antar masyarakat lokal dan masyarakat pendatang, dimana masyarakat

pendatang dengan ciri hubungan masyarakat perkotaan, sedangkan penduduk lokal masih dalam konteks hubungan sosial yang baik namun, ada beberapa sampel penduduk yang mulai mengarah pada hubungan sosial masyarakat perkotaan.

2) Konflik Sosial

Data dari hasil kuesioner mengenai konflik sosial yang terjadi di lokasi penelitian yang diambil melalui responden masyarakat meliputi 70 responden penduduk lokal dan 30 responden penduduk pendatang. Maka distribusi jawaban responden dan pembobotan terhadap konflik sosial dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.17
Distribusi Persepsi Terhadap Konflik Sosial

No	Jawaban Responden	Penduduk Lokal			Penduduk Pendatang		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	Sering Terjadi	0	0,00	0	0	0,00	0
2	Biasa Terjadi	38	54,29	76	16	53,33	32
3	Tidak Pernah	32	45,71	96	14	46,67	42
	Jumlah	70	100,00	172	30	100,00	74

Sumber: Hasil Analisis

Dari tabel diatas, menunjukkan distribusi jawaban responden kuesioner mengenai indikator/subvariabel konflik sosial bahwa responden penduduk lokal yang menjawab sering terjadi berjumlah 0 responden atau 0,00%, responden yang menjawab biasa terjadi berjumlah 38 responden atau sebesar 54,29%, dan responden menjawab tidak pernah berjumlah 32 responden atau sebesar 45,71 %. Sedangkan untuk responden penduduk pendatang yang menjawab sering terjadi

berjumlah 0 responden atau 0,00%, responden yang menjawab biasa terjadi berjumlah 16 responden atau sebesar 53,33%, dan responden menjawab tidak pernah masyarakat berjumlah 14 responden atau sebesar 46,67 %.

Proses diatas menunjukkan nilai distribusi responden terkait konflik sosial di Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden baik penduduk lokal maupun penduduk pendatang masih pada kategori baik. Hal ini terkondisi akibat masih minimnya konflik sosial yang terjadi di lokasi penelitian yang disebabkan oleh kontrol sosial yang dilakukan di lingkungan masyarakat maupun keluarga mampu menjaga persoalan sosial seperti konflik antar komunitas. Data responden juga menunjukkan konflik sosial hanya berada pada tingkatan kadang terjadi hingga tidak pernah terjadi di Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali. Artinya perkembangan permukiman formal dengan dominan masyarakat pendatang bertambah belum memberikan dampak pada pengurangan kontrol sosial masyarakat yang dapat memicu terjadinya konflik sosial di daerah peri urban Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali. Sehingga kedepan kontrol sosial perlu dijaga baik dilingkungan masyarakat maupun keluarga.

3) Interaksi Masyarakat

Data dari hasil kuesioner mengenai interaksi masyarakat yang terjadi di lokasi penelitian yang diambil melalui responden masyarakat meliputi 70 responden penduduk lokal dan 30 responden penduduk pendatang. Maka distribusi jawaban responden dan pembobotan terhadap interaksi masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.18
Distribusi Persepsi Terhadap Interaksi Masyarakat

No	Jawaban Responden	Penduduk Lokal			Penduduk Pendatang		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	< 2 x per minggu	17	24,29	17	21	70,00	21
2	3 – 4 x per minggu	21	30,00	42	9	30,00	18
3	4 – 6 x per minggu	32	45,71	96	0	0,00	0
Jumlah		70	100,00	155	30	100,00	39

Sumber: Hasil Analisis

Dari tabel diatas, menunjukkan distribusi jawaban responden kuesioner mengenai indikator/subvariabel interaksi sosial bahwa responden penduduk lokal yang menjawab interaksi terjadi < 2 x per minggu berjumlah 17 responden atau 24,29%, responden yang menjawab interaksi terjadi 3 – 4 x per minggu berjumlah 21 responden atau sebesar 30,00%, dan responden menjawab interaksi terjadi 4 – 6 x per minggu berjumlah 32 responden atau sebesar 45,71 %. Sedangkan untuk responden penduduk pendatang yang menjawab interaksi terjadi < 2 x per minggu berjumlah 21 responden atau 70,00%, responden yang menjawab interaksi terjadi 3 – 4 x per minggu berjumlah 9 responden atau sebesar 30,00%, dan responden menjawab interaksi terjadi 4 – 6 x per minggu berjumlah 0 responden atau sebesar 0,00 %.

Proses diatas menunjukkan nilai distribusi responden terkait interaksi masyarakat di Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden penduduk lokal maka kategori klasifikasi nilai baik sedangkan nilai distribusi frekuensi penduduk pendatang berada pada kategori buruk. Hal ini terkondisi akibat dominasi masyarakat lokal masih menjunjung

nilai kekerabatan sehingga proses interaksi antara masyarakat masih terjalin dengan baik di Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali, sedangkan pada penduduk pendatang proses interaksi mulai berkurang dikarenakan kesibukan sehari-hari. Artinya perkembangan permukiman formal dengan dominan masyarakat pendatang bertambah memberikan kontribusi terhadap pola hubungan sosial, salah satunya adalah proses interaksi antar masyarakat.

b. Struktur Sosial

1) Tingkat Pendidikan

Data dari hasil kuesioner mengenai tingkat pendidikan pada lokasi penelitian yang diambil melalui responden masyarakat meliputi 70 responden penduduk lokal dan 30 responden penduduk pendatang. Maka distribusi jawaban responden dan pembobotan terhadap tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.19
Distribusi Persepsi Terhadap Tingkat Pendidikan

No	Jawaban Responden	Penduduk Lokal			Penduduk Pendatang		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	Baik	0	0,00	0	30	100	90
2	Cukup	25	35,71	50	0	0	0
3	Kurang	45	64,29	45	0	0	0
Jumlah		70	100,00	95	30	100	90

Sumber: Hasil Analisis

Dari tabel diatas, menunjukkan distribusi jawaban responden kuesioner mengenai indikator/subvariabel tingkat pendidikan bahwa responden penduduk lokal yang menjawab baik berjumlah 0 responden atau 0,00%, responden yang

menjawab cukup berjumlah 25 responden atau sebesar 35,71%, dan responden menjawab kurang berjumlah 45 responden atau sebesar 64,29%. Sedangkan untuk responden penduduk pendatang yang menjawab baik berjumlah 30 responden atau 100%, responden yang menjawab cukup berjumlah 0 responden atau sebesar 0,00%, dan responden menjawab kurang berjumlah 0 responden atau sebesar 0,00%.

Proses diatas menunjukkan perbedaan tingkat pendidikan pada wilayah peri urban Kota Bulukumba di Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali, dimana nilai distribusi frekuensi tingkat pendidikan pada penduduk lokal dengan nilai buruk terkondisi akibat dominan penduduk lokal dengan jenjang pendidikan SD hingga SMP, akan tetapi pada responden penduduk pendatang dikategorikan baik dikarena dominan masyarakat berada pada jenjang pendidikan sarjana. Hal ini merekondisi perbedaan status sosial berdasarkan tingkat pendidikan antara komunitas lokal dengan komunitas pendatang.

2) Kepemilikan Status Lahan

Data dari hasil kuesioner mengenai kepemilikan status lahan di lokasi penelitian yang diambil melalui responden masyarakat meliputi 70 responden penduduk lokal dan 30 responden penduduk pendatang. Maka distribusi jawaban responden dan pembobotan terhadap kepemilikan status lahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.20
Distribusi Persepsi Terhadap Kepemilikan Status Lahan

No	Jawaban Responden	Penduduk Lokal			Penduduk Pendatang		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	Milik	67	95,71	201	28	93,33	84
2	Hak Sewa	0	0,00	0	2	6,67	4
3	Hak Pakai	3	4,29	3	0	0,00	0
	Jumlah	70	100,00	204	30	100,00	88

Sumber: Hasil Analisis

Dari tabel diatas, menunjukkan distribusi jawaban responden kuesioner mengenai indikator/subvariabel kepemilikan status lahan bahwa responden penduduk lokal yang menjawab milik berjumlah 67 responden atau 95,71%, responden yang menjawab hak sewa berjumlah 0 responden atau sebesar 0,00%, dan responden menjawab hak pakai berjumlah 3 responden atau sebesar 4,29%. Sedangkan untuk responden penduduk pendatang yang menjawab milik berjumlah 28 responden atau 93,33%, responden yang menjawab hak sewa berjumlah 2 responden atau sebesar 6,67%, dan responden menjawab hak pakai berjumlah 0 responden atau sebesar 0,00%.

Proses diatas menunjukkan nilai distribusi responden terkait kepemilikan status lahan di Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali, dimana berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden baik penduduk lokal maupun penduduk pendatang masih pada kategori baik. Hal ini terkondisi akibat kepemilikan status lahan didominasi pada status hak milik.

3) Kepemilikan Barang Berharga

Data dari hasil kuesioner mengenai kepemilikan barang berharga masyarakat di lokasi penelitian yang diambil melalui responden masyarakat meliputi 70 responden penduduk lokal dan 30 responden penduduk pendatang. Maka distribusi jawaban responden dan pembobotan terhadap kepemilikan barang berharga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.21
Distribusi Persepsi Terhadap Kepemilikan Barang Berharga

No	Jawaban Responden	Penduduk Lokal			Penduduk Pendatang		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	Baik	10	14,29	30	27	90,00	81
2	Cukup	39	55,71	78	3	10,00	6
3	Kurang	21	30,00	21	0	0,00	0
Jumlah		70	100,00	129	30	100,00	87

Sumber: Hasil Analisis

Dari tabel diatas, menunjukkan distribusi jawaban responden kuesioner mengenai indikator/subvariabel kepemilikan barang berharga bahwa responden penduduk lokal yang menjawab baik berjumlah 10 responden atau 14,29%, responden yang menjawab cukup berjumlah 39 responden atau sebesar 55,71%, dan responden menjawab kurang berjumlah 21 responden atau sebesar 30,00 %. Sedangkan untuk responden penduduk pendatang yang menjawab baik berjumlah 27 responden atau 90,00%, responden yang menjawab cukup berjumlah 3 responden atau sebesar 10,00%, dan responden menjawab kurang berjumlah 0 responden atau sebesar 0,00 %.

Proses diatas menunjukkan nilai distribusi responden terkait kepemilikan barang berharga masyarakat di Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali berdasarkan nilai distribusi frekuensi jawaban responden penduduk lokal adalah cukup sedangkan nilai distribusi frekuensi penduduk pendatang berada pada kategori baik. Artinya terjadi perbedaan kepemilikan barang berharga masyarakat lokal tidak sebanding dengan kepemilikan barang berharga yang dimiliki oleh penduduk pendatang yang bermukim di permukiman formal. Kecenderungan kegiatan masyarakat lokal sebagai buruh tani yang semakin minim lahan produksi padi yang beralih fungsi menjadi kawasan perumahan formal berdampak pada pengurangan pendapatan masyarakat lokal khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani.

2. Sintesis Penelitian

Fungsi ruang bekerja sebagai determinan perubahan kondisi sosial masyarakat di Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali, dimana saat ini belum menunjukkan perubahan sosial penduduk lokal secara signifikan. Fakta dilapangan menunjukkan perbedaan kondisi sosial antara penduduk pendatang dengan penduduk lokal. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi terhadap persepsi masyarakat di wilayah peri urban Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali terkait kondisi sosial masyarakat dalam artian sistem sosial penduduk lokal masih dalam kategori baik, dimana proses interaksi antar masyarakat masih terjaga mencakup keseluruhan warga tanpa membedakan golongan atau etnis. Sedangkan pada kasus konflik sosial masih dalam kategori jarang atau bahkan tidak pernah terjadi, namun beberapa persepsi masyarakat menunjukkan proses konflik sosial mulai

terjadi berdasarkan jawaban responden ada yang mengatakan kadang terjadi sehingga dapat diinterpretasikan bahwa kondisi sosial masyarakat mulai mengarah pada model sosial masyarakat perkotaan.

Pada kondisi sosial masyarakat pendatang terjadi perbedaan signifikan dengan masyarakat lokal, khususnya pada proses interaksi dan hubungan sosial yang terjadi sesuai dengan tingkat ekonomi dan ada hubungan profesi, sehingga relasi yang terbangun diakibatkan oleh aktivitas ekonomi. Sehingga bila dikonstruksikan terhadap proses tersebut maka adanya perbedaan sistem sosial penduduk lokal dan penduduk pendatang, baik dari segi interaksi, hubungan sosial, maupun konflik sosial serta status sosial yang berbeda pula dari segi ekonomi maupun tingkat pendidikan. Artinya fungsi ruang yang terbangun di wilayah peri urban Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali saat ini belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap perubahan sosial masyarakat lokal, akan tetapi proses tersebut memberikan formasi sosial baru yang dibangun oleh penduduk pendatang, sehingga lambat laun sering perkembangan fungsi ruang permukiman formal yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk pendatang serta perubahan fungsi agraris menjadi fungsi permukiman perkotaan akan berimplikasi terhadap perubahan sosial pada komunitas lokal. Sejalan dengan pemikiran Yunus, 2008 bahwa transformasi spasial pada wilayah peri urban berdampak pada dekohesivitas (perubahan) sosial masyarakat lokal.

F. Perubahan Fungsi Ruang Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat

Setempat

1. Deskripsi Responden

Deskripsi responden terkait kondisi ekonomi masyarakat di Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali meliputi tiga indikator/sub variabel adalah sebagai berikut.

a. Mata Pencaharian

Data dari hasil kuesioner mengenai mata pencaharian di lokasi penelitian yang diambil melalui responden masyarakat meliputi 70 responden penduduk lokal dan 30 responden penduduk pendatang. Maka distribusi jawaban responden dan pembobotan terhadap mata pencaharian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.22
Distribusi Persepsi Terhadap Mata Pencaharian

No	Jawaban Responden	Penduduk Lokal			Penduduk Pendatang		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	Pengawai/PNS	1	1,43	1	17	56,67	17
2	Swasta	9	12,86	18	13	43,33	26
3	Buruh/Tani	60	85,71	180	0	0,00	0
	Jumlah	70	100,00	199	30	100,00	43

Sumber: Hasil Analisis

Dari tabel 4.22 diatas, menunjukkan distribusi jawaban responden kuesioner mengenai indikator/subvariabel mata pencaharian menunjukkan responden penduduk lokal yang menjawab PNS/pegawai berjumlah 1 responden atau 1,43%, responden yang menjawab swasta berjumlah 9 responden atau sebesar 12,86%, dan responden menjawab buruh tani berjumlah 60 responden atau sebesar

85,71%. Sedangkan untuk responden penduduk pendatang yang menjawab PNS/pegawai berjumlah 17 responden atau 56,67%, responden yang menjawab swasta berjumlah 13 responden atau sebesar 43,33%, dan responden menjawab buruh tani berjumlah 0 responden atau sebesar 0,00%.

Proses diatas menunjukkan perbedaan mata pencaharian masyarakat di Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali, dimana pada masyarakat lokal mata pencaharian masyarakat didominasi oleh buruh tani sedangkan untuk penduduk pendatang didominasi oleh pegawai/PNS. Bila dikontekskan pada kondisi saat ini menunjukkan bahwa dominan mata pencaharian masyarakat setempat masih didominasi oleh buruh tani akan tetapi bila dikontekskan jumlah masyarakat yang bermatapencaharian buruh tani atau banyaknya jenis usaha pertanian di tahun 2003 sebelum adanya pengembangan kawasan peri urban di Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali adalah 13.169 jenis usaha di Kecamatan Gantarang sedangkan saat ini mengalami penurunan dengan jumlah masyarakat lokal yang bermatapencaharian buruh tani banyaknya jenis usaha pertanian adalah 11.673 jenis usaha, mengalami penurunan sebesar 11,63% (Data Sensus Pertanian, 2013). Artinya lambat laun seiring dengan perkembangan ruang permukiman di daerah peri urban Kota Bulukumba yang dicirikan dengan perubahan pemanfaatan ruang dari lahan pertanian sawah menjadi kawasan permukiman berkontribusi secara positif terhadap perubahan orientasi mata pencaharian.

b. Tingkat Pendapatan

Data dari hasil kuesioner mengenai tingkat pendapatan di lokasi penelitian yang diambil melalui responden masyarakat meliputi 70 responden penduduk

lokal dan 30 responden penduduk pendatang. Maka distribusi jawaban responden dan pembobotan terhadap tingkat pendapatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.23
Distribusi Persepsi Terhadap Tingkat Pendapatan

No	Jawaban Responden	Penduduk Lokal			Penduduk Pendatang		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	Baik	1	1,43	1	30	100,00	30
2	Cukup	37	52,86	74	0	0,00	0
3	Buruk	32	45,71	96	0	0,00	0
Jumlah		70	100,00	171	30	100	30

Sumber: Hasil Analisis

Dari tabel diatas, menunjukkan distribusi jawaban responden kuesioner mengenai indikator/subvariabel tngkat pendapatan menunjukkan bahwa responden penduduk lokal yang menjawab baik berjumlah 1 responden atau 1,43%, responden yang menjawab cukup berjumlah 37 responden atau sebesar 52,86%, dan responden menjawab buruk berjumlah 32 responden atau sebesar 45,71%. Sedangkan untuk responden penduduk pendatang yang menjawab baik berjumlah 30 responden atau 100%, responden yang menjawab cukup berjumlah 0 responden atau sebesar 0,00%, dan responden menjawab buruk berjumlah 0 responden atau sebesar 0,00%.

Proses diatas menunjukkan nilai distribusi responden terkait tingkat pendapatan masyarakat di Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali, dimana berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden baik penduduk lokal maupun penduduk pendatang memiliki perbedaan antara pendapatan penduduk lokal

dengan pendapatan penduduk pendatang, pada penduduk lokal kategori distribusi frekuensi dengan nilai buruk sedangkan pada penduduk pendatang kategori nilai baik, dari prespektif tingkat pendapatan. Hal ini terkondisi akibat luas lahan garapan petani yang dominan masyarakat lokal mulai berkurang sering perkembangan fungsi ruang permukiman atas ruang persawahan. Kondisi ini terindikasi akibat pengurangan luasan lahan sawah dari luas 626,36 Ha menjadi 401,92 Ha. Berdasarkan data statistik Kecamatan Gantarang dalam angka menunjukkan jumlah produksi hasil pertanian sawah di tahun 2014 adalah 6,41 ton/ha sedangkan mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 6 ton/ha. Artinya transformasi spasial ruang sawah ke fungsi ruang permukiman memberikan kontribusi terhadap perubahan pendapatan masyarakat lokal.

c. Tingkat Kesejahteraan

Data dari hasil kuesioner mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat di lokasi penelitian yang diambil melalui responden masyarakat meliputi 70 responden penduduk lokal dan 30 responden penduduk pendatang. Maka distribusi jawaban responden dan pembobotan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.24
Distribusi Persepsi Terhadap Tingkat Kesejahteraan

No	Jawaban Responden	Penduduk Lokal			Penduduk Pendatang		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	Baik	1	1,43	1	30	100,00	30
2	Cukup	37	52,86	74	0	0,00	0
3	Buruk	32	45,71	96	0	0,00	0
Jumlah		70	100,00	171	30	100	30

Sumber: Hasil Analisis

Dari tabel 4.24 di atas, menunjukkan distribusi jawaban responden kuesioner mengenai indikator/subvariabel tingkat kesejahteraan bahwa responden penduduk lokal yang menjawab baik berjumlah 1 responden atau 1,43%, responden yang menjawab cukup berjumlah 37 responden atau sebesar 52,86%, dan responden menjawab buruk berjumlah 32 responden atau sebesar 45,71 %. Sedangkan untuk responden penduduk pendatang yang menjawab baik berjumlah 30 responden atau 100%, responden yang menjawab cukup berjumlah 0 responden atau sebesar 0,00%, dan responden menjawab buruk berjumlah 0 responden atau sebesar 0,00 %.

Proses diatas menunjukkan nilai distribusi responden terkait tingkat kesejahteraan masyarakat di Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali, dimana berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden penduduk lokal maupun penduduk pendatang memiliki perbedaan tingkat kesejahteraan, pada penduduk lokal kategori distribusi frekuensi dengan nilai cukup, sedangkan pada penduduk pendatang kategori nilai baik.

2. Sintesis Penelitian

Perubahan kondisi ekonomi masyarakat setempat dari segi mata pencaharian, pendapatan, dan kesejahteraan yaitu mata pencaharian yang semula didominasi petani karena fungsi dominan persawahan di wilayah peri urban Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan fungsi ruang baru. Fungsi ruang sawah di wilayah peri urban Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali yang berubah menjadi lahan permukiman berkontribusi terhadap perubahan orientasi mata pencaharian

setempat. Surya, B, 2015 menyebutkan bahwa alih fungsi guna lahan yang sangat intensif pada kota baru, menyebabkan perubahan orientasi kegiatan penduduk agraris ke orientasi kegiatan industrial perkotaan. Artinya perkembangan di wilayah peri urban Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali sebagai efek dari perluasan wilayah Kota Bulukumba yang perkembangannya mengarah ke wilayah bagian luar sebagai pengembangan kawasan permukiman akan memberikan pengaruh terhadap orientasi kegiatan masyarakat setempat. Sejalan dengan pemikiran Sugiana (2011), menegaskan bahwa isu yang muncul dari proses transformasi peri-urban adalah peningkatan kegiatan ekonomi yang relatif cepat dari pertanian ke non pertanian, perubahan pemanfaatan lahan ke arah perumahan urban, industri, dan peningkatan kepadatan penduduk.

Fungsi ruang yang berkembang juga akan memberikan efek terhadap laju pertumbuhan penduduk khususnya penduduk pendatang dengan tingkat perekonomian yang berbeda serta orientasi pekerjaan yang berbeda pula. Pengaruh kegiatan ekonomi kekotaan yang secara umum dikaitkan dengan kegiatan ekonomi berorientasi pada non-agraris lambat laun akan semakin nyata terlihat. Transformasi kegiatan ekonomi kekotaan terjadi di wilayah peri urban Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali mengakibatkan transformasi kegiatan perekonomian yang dilaksanakan oleh penduduk asli, meningkatnya kegiatan perekonomian yang diprakarsai oleh penduduk pendatang, serta segregasi baik secara ruang fisik maupun sosial ekonomi antar komunitas (lokal dan pendatang).

G. Determinan Perubahan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Peri Urban

Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat

Perubahan pemanfaatan ruang di wilayah peri urban Kota Bulukumba terkondisi akibat arahan rencana pemanfaatan ruang di Kabupaten Bulukumba yang menetapkan Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali sebagai daerah pengembangan baru yang diarahkan untuk pengembangan kawasan permukiman. Proses tersebut merekondisi terjadinya alih fungsi guna lahan dari lahan pertanian sawah berubah fungsi menjadi lahan permukiman formal. Yunus (2001) menyebutkan transformasi spasial terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian adalah (a) hilangnya lahan pertanian, (b) gejala komersialisasi dan intensifikasi pertanian, (c) produksi dan produktivitas.

1. Perbedaan Formasi Sosial Masyarakat WPU Kota Bulukumba

Perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi dari lahan agraris menjadi lahan industrial perkotaan di wilayah peri urban Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali merekondisi terbentuknya dua formasi sosial yang berbeda antara penduduk pendatang dengan penduduk lokal, perbedaan mencolok meliputi model interaksi yang terbangun, status sosial yang berbeda, serta sistem sosial yang berbeda pula. Perbedaan formasi sosial yang terjadi akibat peningkatan penduduk pendatang yang membawa formasi sosial perkotaan masuk ke lingkungan masyarakat lokal sehingga terbangun dua formasi sosial baru komunitas pendatang dengan komunitas lokal.

Tabel 4.25
Matriks Perbedaan Formasi Sosial Penduduk Pendatang dengan Penduduk Lokal

Formasi Sosial Penduduk Lokal	Formasi Sosial Penduduk Pendatang
Hubungan sosial yang terbangun di masyarakat lokal masih berhubungan sosial dengan seluruh golongan masyarakat tanpa membedakan strata, dan klas sosial.	Hubungan Sosial yang terbangun di masyarakat pendatang cenderung membangun hubungan sosial dengan masyarakat yang sama golongan dari segi profesi dan hubungan relasi ekonomi.
Interaksi sosial pada masyarakat lokal dengan intensitas berinteraksi 4 – 6 x per minggu	Interaksi sosial pada masyarakat lokal dengan intensitas berinteraksi < 2 x per minggu

Sumber: Hasil Analisis

Matriks diatas menunjukkan perbedaan formasi sosial yang terbangun antara penduduk pendatang dengan penduduk lokal yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk pendatang yang membawa formasi sosial baru yang terkondisi akibat perubahan fungsi ruang di WPU perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali. Perbedaan formasi sosial yang terjadi meliputi perbedaan pola hubungan sosial komunitas pendatang dan komunitas lokal serta perbedaan pola interaksi masyarakat terhadap lingkungan dan intensitas masyarakat dalam melakukan interaksi khususnya masyarakat lokal yang masih menjunjung nilai kekerabatan, sehingga proses interaksi antara masyarakat lokal masih terjalin dengan baik di perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali, sedangkan pada penduduk pendatang proses interaksi mulai berkurang dikarenakan kesibukan sehari-hari. Perkembangan permukiman formal menyebabkan pertumbuhan penduduk pendatang yang semakin meningkat memberikan kontribusi terhadap

pola hubungan sosial dan interaksi masyarakat. Artinya perubahan fungsi ruang dari fungsi agraris menjadi fungsi industrial perkotaan merekondisi terjadi perbedaan formasi sosial antar komunitas lokal dan komunitas pendatang. Sejalan dengan pemikiran Yunus, 2008 bahwa transformasi spasial pada wilayah peri urban berdampak pada dekohesivitas (perubahan) sosial masyarakat lokal.

2. Perbedaan Struktur Sosial Masyarakat WPU Kota Bulukumba

Peningkatan jumlah penduduk di wilayah peri urban yang terkondisi akibat perubahan fungsi ruang perkotaan menyebabkan perbedaan struktur sosial pada masyarakat peri urban perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali. Secara fisik spasial terjadi segregasi ruang permukiman formal dan permukiman informal, secara tidak langsung kenampakan fisik spasial berkontribusi positif terhadap perbedaan struktur sosial komunitas lokal dan pendatang.

Tabel 4.26
Matriks Perbedaan Struktur Sosial Penduduk Pendatang dengan Penduduk Lokal

Struktur Sosial Penduduk Lokal	Struktur Sosial Penduduk Pendatang
Struktur sosial yang ditinjau dari aspek tingkat pendidikan: dominan masyarakat lokal dengan tingkat pendidikan SD dan SMP.	Struktur sosial yang ditinjau dari aspek tingkat pendidikan: dominan masyarakat pendatang dengan tingkat pendidikan Sarjana.
Perbedaan tingkat pendapatan pada komunitas lokal cenderung kepemilikan barang mewah kendaraan roda dua serta pendapatan tidak menentu.	tingkat pendapatan dan kepemilikan barang mewah pada komunitas pendatang cenderung kepemilikan barang mewah kendaraan roda empat dengan pendapatan diatas Rp.4.000.000,- /bulan.

Sumber: Hasil Analisis

Matriks 4.26 diatas menunjukkan perbedaan struktur sosial antara komunitas pendatang dengan komunitas lokal di wilayah peri urban perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali. Proses tersebut dicirikan dengan perbedaan dari segi tingkat pendidikan yang kecenderungan penduduk lokal tingkat pendidikan dari SD hingga SMP, sedangkan pada komunitas pendatang didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan sarjana. Dari segi tingkat pendapatan, perbedaan kepemilikan barang berharga masyarakat lokal tidak sebanding dengan kepemilikan barang berharga yang dimiliki oleh penduduk pendatang yang bermukim di permukiman formal. Kecenderungan kegiatan masyarakat lokal sebagai buruh tani yang semakin minim lahan produksi padi yang beralih fungsi menjadi kawasan perumahan formal berdampak pada pengurangan pendapatan masyarakat lokal khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani, sedangkan dominan masyarakat pendatang berprofesi di sektor formal dan pemerintahan berdampak pada tingkat pendapatan mereka, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan struktur sosial pada masyarakat. Selain itu ditinjau dari aspek hunian terjadi segregasi antara hunian yang dimukim oleh komunitas lokal dengan hunian yang dimukim oleh komunitas pendatang. Sejalan dengan pemikiran Yunus, 2008 menyebutkan dampak transformasi spasial terhadap lahan permukiman merekondisi terjadinya penambahan jumlah luas lahan permukiman, pemadatan bangunan rumah mukim, serta kecenderungan segregasi bangunan hunian masyarakat.

H. Dampak Perubahan Fungsi Ruang Terhadap Kondisi Ekonomi

Masyarakat

1. Perubahan Orientasi Mata Pencaharian Setempat

Fungsi ruang sawah di wilayah peri urban perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali yang berubah menjadi lahan permukiman berkontribusi terhadap perubahan orientasi mata pencaharian setempat. Proses tersebut diakibatkan oleh perubahan pemanfaatan ruang yang merekonstruksi terjadinya perubahan fungsi guna lahan dari lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan permukiman formal, perdagangan, dan lahan kosong sebagai lahan pengembangan baru menyebabkan pengurangan aktivitas luasan lahan pertanian sehingga berimplikasi terhadap penurunan jumlah usaha pertanian.

Fakta dilapangan menunjukkan mata pencaharian masyarakat lokal didominasi oleh buruh tani sedangkan untuk penduduk pendatang didominasi oleh pegawai/PNS. Bila dikontekskan pada kondisi saat ini menunjukkan bahwa dominan mata pencaharian masyarakat setempat masih didominasi oleh buruh tani akan tetapi bila dikontekskan jumlah masyarakat yang bermatapencaharian buruh tani atau banyaknya jenis usaha pertanian di tahun 2003 sebelum adanya pengembangan kawasan peri urban di daerah perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali adalah 13.169 jenis usaha di Kecamatan Gantarang sedangkan saat ini mengalami penurunan dengan jumlah masyarakat lokal yang bermatapencaharian buruh tani banyaknya jenis usaha pertanian adalah 11.673 jenis usaha, mengalami penurunan sebesar 11,63% (Data Sensus Pertanian, 2013). Artinya lambat laun seiring dengan perkembangan ruang permukiman di daerah peri urban Kota

Bulukumba yang dicirikan dengan perubahan pemanfaatan ruang dari lahan pertanian sawah menjadi kawasan permukiman berkontribusi secara positif terhadap perubahan orientasi mata pencaharian yang kedepan kecenderungan masyarakat setempat akan melakukan perubahan orientasi pekerjaan kearah industrial perkotaan. Surya, B, 2015 menyebutkan bahwa alih fungsi guna lahan yang sangat intensif pada kota baru, menyebabkan perubahan orientasi kegiatan penduduk agraris ke orientasi kegiatan industrial perkotaan. Artinya perkembangan di wilayah peri urban Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali sebagai efek dari perluasan wilayah Kota Bulukumba yang perkembangannya mengarah ke wilayah bagian luar sebagai pengembangan kawasan permukiman baru akan memberikan pengaruh terhadap orientasi kegiatan masyarakat setempat.

2. Pengurangan Luasan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Permukiman dan Industrial Perkotaan

Luas lahan garapan petani yang dominan masyarakat lokal mulai berkurang seiring perkembangan fungsi ruang permukiman atas ruang persawahan. Kondisi ini terindikasi akibat pengurangan luasan lahan sawah dari luas 626,36 Ha menjadi 401,92 Ha. Berdasarkan data statistik Kecamatan Gantarang dalam angka menunjukkan jumlah produksi hasil pertanian sawah di tahun 2014 adalah 6,41 ton/ha sedangkan mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 6 ton/ha. Artinya transformasi spasial ruang sawah ke fungsi ruang permukiman memberikan kontribusi terhadap perubahan pendapatan masyarakat lokal. Sejalan dengan pemikiran Sugiana (2011), menegaskan bahwa isu yang muncul dari proses transformasi peri-urban adalah peningkatan kegiatan ekonomi yang

relatif cepat dari pertanian ke non pertanian, perubahan pemanfaatan lahan ke arah perumahan urban, industri, dan peningkatan kepadatan penduduk.

3. Perbedaan Tingkat Kesejahteraan Antar Penduduk Lokal Dengan Penduduk Pendatang.

Perubahan pemanfaatan ruang di wilayah peri urban Kota Bulukumba yang dicirikan dengan pengurangan luasan lahan pertanian akibat perkembangan kawasan permukiman formal serta berkembangnya fungsi perdagangan. Transformasi spasial ruang sawah ke fungsi ruang permukiman memberikan kontribusi terhadap penurunan hasil produksi pertanian di WPU Kota Bulukumba. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat terkondisi akibat perbedaan karakteristik ekonomi yang terbangun mengikuti fungsi ruang yang berkembang di wilayah peri urban Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali.

Fungsi ruang yang berkembang juga akan memberikan efek terhadap transformasi kegiatan ekonomi kekotaan yang berorientasi pada non-agraris lambat laun akan semakin nyata terlihat di wilayah peri urban Perkotaan Paenre Lompoe dan Polewali mengakibatkan perkembangan aktifitas perekonomian yang dilaksanakan oleh penduduk asli, meningkatnya kegiatan perekonomian yang diprakarsai oleh penduduk pendatang, serta segregasi baik secara ruang fisik maupun sosial ekonomi antar komunitas (lokal dan pendatang).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan fungsi ruang yang terbangun di kawasan pinggiran Kota Bulukumba dari ciri agraris berkembang kearah industrial perkotaan dan permukiman formal berkontribusi positif terhadap terbentuknya formasi sosial baru yang dibangun oleh penduduk pendatang, meliputi model interaksi, status sosial yang terbangun, maupun sistem sosial yang berimplikasi terhadap perubahan sosial pada komunitas lokal.
2. Perubahan sistem ekonomi pada masyarakat lokal ditandai dengan penurunan jenis usaha dibidang pertanian serta penurunan hasil produktifitas pertanian di wilayah pinggiran Kota Bulukumba, sepenuhnya terkondisi akibat perubahan fungsi ruang pada wilayah peri urban Kota Bulukumba kearah industrial perkotaan. Artinya perubahan ekonomi dan sosial masyarakat lokal disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan dari lahan agraris kearah industrial perkotaan.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini saran adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota, agar dalam melihat fenomena perkembangan kota yang semakin berkembang kearah pinggiran perkotaan yang disebut sebagai wilayah peri urban akan memberikan dampak terhadap transformasi fisik, sosial, maupun ekonomi.
2. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bulukumba khususnya bidang penataan ruang agar lebih meningkatkan unsur perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pada daerah baru pengembangan perkotaan, yang apabila terjadi percepatan pembangunan luasan areal perkotaan khususnya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman agar melihat implikasi secara sosiokultural serta implikasi ekonomi yang ditimbulkan akibat pembangunan di kawasan pinggiran kota.
3. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan fokus penelitian pada wilayah peri urban di Kota Bulukumba, dengan hanya melihat variabel kondisi sosial (sistem sosial dan struktur sosial) tidak melihat secara keseluruhan indikator terkait perubahan sosial serta model hubungan yang terbangun antara komunitas lokal dan komunitas pendatang terkait fenomena artikulasi spasial, sehingga diharapkan kedepan dapat dikembangkan sebagai penelitian terbaru dan pengembangan dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Kabupaten Bulukumba dalam Angka tahun 2016
- Anonim, Kecamatan Gantarang dalam Angka tahun 2016
- Ariyanto, (2015). *Determinan Pembangunan Kawasan Kota Baru Moncongloe-Pattallassang dan Daerah Sekitarnya*. Tesis. Universitas Bosowa
- Jayadinata, Johara T (1999) *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*, Penerbit ITB Bandung, Bandung.
- Jauhari, Agung (2011) *Dampak Pembangunan Perumahan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kondisi Sosial Ekonomi Penjual Lahan di Kecamatan Mlati*, Jurnal.
- Rohmadiani, Linda Dwi (2011) *Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani*, *Jurnal Teknik WAKTU Volume 09 No. 02*
- Rohman, TAufiq Hidayat Ar, (2011) *pengaruh keberadaan kampung inggris terhadap guna lahan dan sosial ekonomi masyarakat desa di Tulung Rejo dan Desa Palem*, *Jurnal Tata Kota dan Daerah Volume 3 No. 1*
- Saputra, Erlis (2007), *Perubahan Spasial Dan Tendensi Perkembangan Fisik Kota Pekanbaru Tahun 1990-2006*. Tesis Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada
- Singarimbun, Masri (1987) *Metode Penelitian Survei*, Penerbit LP3ES, Yogyakarta.

- Sugiana, K. (2011). *Pengembangan Wilayah Melalui Keterkaitan Desa-Kota: Dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21. Konsep Dan Pendekatan Pembangunan di Indonesia*. Hlm 147-167: Edisi 2. Penerbit URDI.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Penerbit. Alfabeta. Bandung.
- Surya, Batara (2011) *Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota*, Penerbit Fahmis Pustaka, Makassar
- Surya Batara, M.Si. 2015. *Sosiologi Spasial Perkotaan*. Penerbit Fahmis Pustaka, Makassar
- Wahyu, S. W. (2007). *Pergeseran Mata Pencarian Masyarakat Desa*, Skripsi: FISIP UNS.
- Yunus. S.H (1999), *Struktur Tata Ruang Kota*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yunus, S.H. 2005. *Manajemen Kota Prespektif Spasial*. Penerbit. Pustaka Pelajar.
- Yunus, S.H. 2008. *Dinamika Wilayah Peri-Urban Diterminan Masa Depan Kota*. Penerbit. Pustaka Pelajar.